

**HUBUNGAN KERJASAMA DAGANG ANTARA AMERIKA
SERIKAT DENGAN TIONGKOK SETELAH IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN *INTERNET PLUS***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:
DWI ARDIANTINI
NIM I72214005**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JANUARI 2019**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Ardiantini
NIM : I72214007
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Hubungan Dagang Antara Amerika Serikat Dengan
Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan *Internet Plus*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 23 Januari 2019
Yang menyatakan



Dwi Ardiantini
NIM I72214005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Ardiantini


NIM : I72214005

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: “Hubungan Kerjasama Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan *Internet Plus*”, saya berpendapat bahwa skripsi ini telah direvisi dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 14 Februari 2019

Pembimbing



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., MA.
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ardiantini dengan judul: **“Hubungan Kerjasama Dagang antara Amerika-Serikat dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan *Internet Plus*”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Januari 2019.

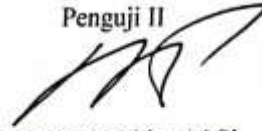
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



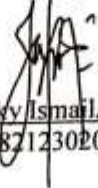
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.IP., MA.
NIP 198408232015031002

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP 198401052011011008

Penguji III



Zaky Ismail, M.S.I
NIP 198712302011011007

Penguji IV




Ridha Amaliyah, S.IP, MBA.
NIP 201409001

Surabaya, 29 Januari 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan


Prof. Ach. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip. SEA, M.Phil, Ph.D.
NIP 197402091998031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Ardiantini
NIM : I72214005
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : dwardiantini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hubungan Dagang Antara Amerika Serikat Dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan *Internet Plus*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(Dwi Ardiantini)

ABSTRAK

Dwi Ardiantini, 2019, *Hubungan Kerjasama Dagang Antara Amerika Serikat Dengan Tiongkok Setelah Implementasi Kebijakan Internet Plus*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Amerika Serikat-Tiongkok, Hubungan Kerjasama Dagang, Kebijakan Internet Plus*

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengaruh implementasi kebijakan *Internet Plus* terhadap hubungan kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder. Saat ini Tiongkok tengah mereformasi sistem perekonomian mereka menjadi pasar bebas guna mewujudkan komitmen mereka dalam ekonomi di era digital untuk terbuka demi keuntungan bersama. Beberapa kebijakan telah disiapkan Tiongkok untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian mereka. Namun sayangnya, beberapa kebijakan Tiongkok yakni salah satunya ialah kebijakan *Internet Plus* yang seharusnya bertujuan untuk mereformasi industri manufaktur serta meningkatkan hubungan kerjasama dagang Tiongkok, justru mendapat banyak kritik dari barat yang mengklaim adanya intervensi secara berlebihan dan perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan asing oleh pemerintah Tiongkok. Dari adanya beberapa ketegangan yang terjadi pasca diimplementasikannya kebijakan internet plus membuat hubungangan kerjasama dagang antara keduanya menjadi fluktuatif. Pertama, terjadi pertemuan antara presiden Obama dan Xi Jinping pada tahun 2016. Kedua, presiden Trump menjatuhkan tariff impor sebanyak 25% kepada Tiongkok. Ketiga, Tiongkok juga menjatuhkan tariff impor 25% kepada Amerika Serikat. Keempat, antara Trump dan Xi Jinping sepakat untuk menghentikan perang tariff selama 90 hari per 01 Januari 2019.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI ... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Manfaat Penelitian | 15 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 16 |
| F. Kerangka Konseptual | 22 |
| 1. Kebijakan <i>Internet Plus</i> | 22 |
| 2. Ekonomi Digital | 23 |
| 3. Perdagangan Digital | 24 |
| 4. Fluktuatif | 25 |
| G. Fokus Penelitian/Argumentasi Utama | 28 |

| | |
|--|-----------|
| H. Metode Penelitian | 30 |
| BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN <i>INTERNET PLUS</i> TIONGGOK: PELUANG SERTA TANTANGAN BAGI PENGUSAHA AMERIKA SERIKAT | |
| AMERIKA SERIKAT | 39 |
| A. Strategi <i>Internet Plus</i> Tiongkok | 44 |
| B. Implementasi dan Inisiatif Strategi <i>Internet Plus</i> Tiongkok | 52 |
| C. Peluang dan Hambatan Bagi Negara Mitra Dagang Tiongkok atas Implementasi Kebijakan <i>Internet Plus</i> | 58 |
| D. Kerugian Bagi Amerika Serikat Atas Kebijakan <i>Internet Plus</i> dibawah Payung Besar <i>China Manufacturing 2025</i> | 62 |
| BAB III HUBUNGAN KERJASAMA DAGANG ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN TIONGGOK SEBELUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN <i>INTERNET</i> | |
| <i>INTERNET</i> | 67 |
| BAB IV FLUKTUASI PERDAGANGAN ANTARA AS-TIONGGOK SETELAH IMPLEMENTASU KEBIJAKAN <i>INTERNET PLUS</i>: KEBIJAKAN BALASAN HINGGA PERANG DAGANG | |
| HINGGA PERANG DAGANG | 63 |
| A. Terjadinya Pertemuan antara Presiden Obama dan Xi Jinping Pada Akhir Tahun 2016 | 82 |
| B. Dijatuhkannya Tarif Impor Oleh Amerika Serikat Terhadap Tiongkok pada Tahun 2018 | 88 |
| C. Tiongkok Menjatuhkan Kebijakan Balasan “Tarif Impor” Terhadap Amerika Serikat di Tahun 2018 | 101 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

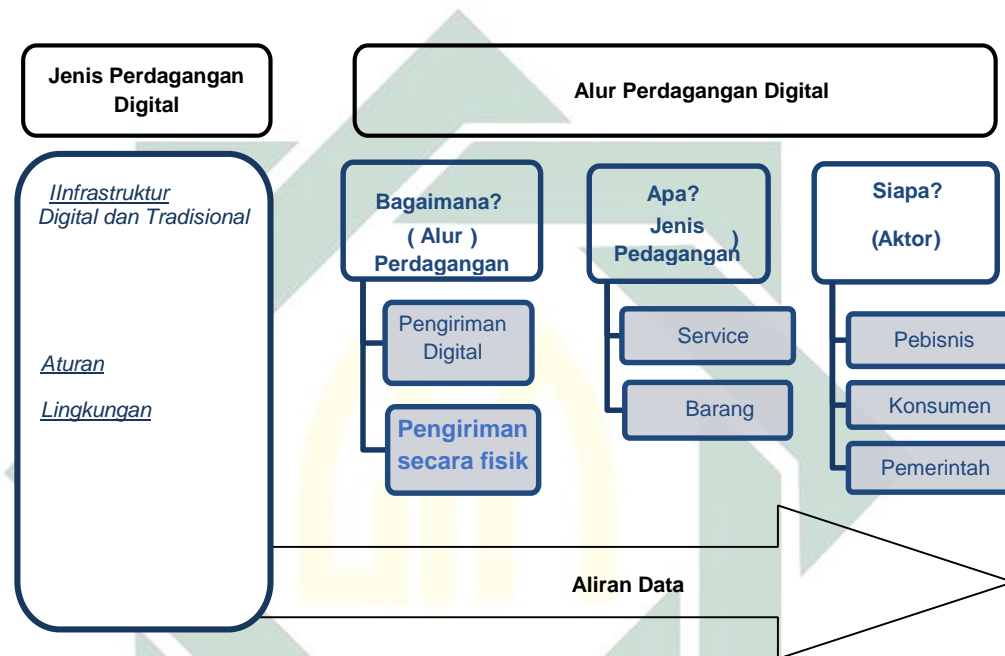
Globalisasi menjadi sebuah fenomena global yang telah mempengaruhi hampir semua sektor yang ada di dunia, khususnya sektor perdagangan. Saat ini teknologi memainkan peran penting bagi kehidupan manusia. Globalisasi secara bertahap masuk ke berbagai belahan dunia ini dengan segala dampak positif dan negatif yang dibawanya bagi kehidupan.

Era baru globalisasi saat ini membawa banyak perubahan bagi negara maju maupun negara berkembang untuk terus mengembangkan kemampuan teknologi berkualitas tinggi di negara mereka agar siap dengan sebuah perekonomian berbasis digital dan bersaing dalam pasar global. Saat ini, globalisasi dan ekonomi digital adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi.¹ Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus mengalami perkembangan setiap harinya, sehingga hal ini memaksa negara-negara di berbagai belahan dunia ini melakukan perubahan agar tidak tertinggal dengan negara lain. Perdagangan digital menjadi salah satu komponen yang ada dalam ekonomi digital akibat adanya globalisasi.² G-20 mengklasifikasikan

¹ Agus Puji Prasetyono, "Persaingan di Era Globalisasi dan Ekonomi Digital," Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2017). Diakses pada 23 Desember 2017: <http://risetdikti.go.id/persaingan-di-era-globalisasi-dan-ekonomi-digital/>.

² "Towards A G20 Initiative On Measuring Digital Trade: Mapping Challenges And Framing The Way Forward," Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*), diakses pada 23

gambaran mengenai perdagangan digital serta bentuk dasar dari kerangka kerjasama dalam perdagangan digital sebagaimana tergambar dalam gambar 1.³



Gambar 1.1:
Tipologi Tentatif Perdagangan Digital

Sumber: G-20 Blue Print Initiative On Measuring Digital Trade, 2017

Dari gambar tipologi tentatif yang telah digambarkan di atas terlihat bagaimana alur perdagangan digital terjadi. Terdapat dua faktor mengapa terjadinya perdagangan digital yakni infrastruktur dan lingkungan. Dalam perdagangan digital, tipe-tipe untuk mengirim barang bisa dilakukan secara

Desember 2017, <https://www.google.co.id/g20/topics/trade/-and-invesment/towards-a-G20-Initiative-on-Measuring-Digital-Trade.pdf>

³ Ibid

digital maupun secara fisik. Selain itu, Terdapat dua transaksi yang diperjual belikan yakni barang dan jasa. Sedangkan terdapat tiga aktor yang melatar belakangi terjadinya perdagangan digital, yakni: negara, pelaku bisnis, dan juga konsumen.⁴

Saat ini, Tiongkok menjadi salah satu contoh negara yang tengah gencar-gencarnya mengembangkan perekonomian digital. Ekonomi digital terus memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pada tahun 2016, ekonomi digital Tiongkok menyumbang 30,3% dari total GDP atau sebanyak 22,6 triliun yuan (\$3,35) triliun.⁵ Pertumbuhan ekonomi digital Tiongkok sebagian besar didorong oleh perusahaan teknologi terkemuka seperti *Tencent*, *Baidu* dan *Alibaba*, sehingga saat ini ekonomi digital Tiongkok menempati urutan kedua terbesar secara global setelah Amerika Serikat.⁶

Menjadi negara dengan jumlah pengguna internet paling banyak di dunia yakni sebanyak 780 juta, Tiongkok terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.⁷ Salah satu upayanya ialah

⁴ Ibid.,

⁵ China's Digital Economy Second Largest in World," The State Council The People's Republic of China. Diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.com/content_281475952910142.html

⁶ China's Digital Economy's Growth Will Soon See It Outpace The Traditional Economy," Forbes (2017), diakses pada 13 Desember 2017, <https://t.co/UffCrX0ML7>

⁷ The World Fact Book," Central Intelligence Agency, diakses pada 13 Desember 2017, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2153rank.html>

melalui kebijakan *Internet Plus*.⁸ Kebijakan *Internet Plus* pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang.⁹ Kebijakan *Internet Plus* mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2015.¹⁰ Strategi atau Kebijakan *Internet Plus* merupakan inovasi yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok sebagai langkah untuk mengubah dan memodernisasi industri manufaktur dari tradisional ke industri manufaktur modern agar siap bergabung dalam pasar internasional di era digital. Kebijakan *Internet Plus* merupakan rencana pemerintah Tiongkok untuk mengintegrasikan internet seluler seperti komputasi awan (*cloud*), data besar, *Internet of Things* (istilah yang digunakan untuk barang-barang yang terkoneksi dengan jaringan internet), *internet banking*, industri pertanian dan perdagangan, serta pengembangan *e-commerce* dan *m-commerce* ke dalam industri manufaktur modern berkualitas tinggi.¹¹

Kebijakan *Internet Plus* juga merupakan bentuk komitmen pemerintah Tiongkok dalam berperan aktif untuk melaksanakan kesepakatan dalam G-20 terkait dengan *G-20 Digital Economic Development and Cooperation Initiative*. Isi dalam kesepakatan tersebut tertulis bahwa Tiongkok sebagai negara anggota telah sepakat dalam mempromosikan, memperdalam serta

⁸ China Should Boost Digital Economy: Premier Li,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/premier/content_281475764961276.htm

⁹ Ibid.,

¹⁰ Hong Yu, “Pivot to Internet Plus: Molding China’s Digital Economy for Economic Restructuring?,” No. 1486–1506, *International Journal of Communication* (2017), diakses pada 11 Desember 2017, <http://ijoc.org./index.php/ijoc/article/viewfile/6105/1990.pdf>

¹¹ Ibid.,

memperkuat kerjasama dalam ekonomi digital.¹² Terdapat tujuh prinsip dalam kesepakatan *G-20 Digital Economic Development and Cooperation Initiative*, yaitu: inovasi, kemitraan, sinergi, fleksibilitas, inklusi atau keterbukaan serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis untuk saling percaya dalam memperluas arus informasi dan keamanan.¹³

Terintegrasi sepenuhnya dari prakarsa kebijakan *Made in China 2025* Tiongkok, kebijakan *Internet Plus* juga merupakan strategi ambisius pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan daya saing bangsa ke dalam pasar global dengan memperbaiki kualitas keseluruhan produk-produk asal Tiongkok. Kebijakan ini berpusat pada reformasi dan modernisasi Tiongkok pada sektor industri manufaktur dari tradisional ke modern yang diperkirakan akan terwujud dalam jangka waktu lima tahun.¹⁴

Modernisasi dan reformasi industri manufaktur merupakan jantung dari strategi pemerintah Tiongkok serta merupakan agenda bersama antara presiden Xi Jinping dan perdana menteri Li Keqiang sebagai langkah transisi Tiongkok untuk menuju industri manufaktur mesin berteknologi tinggi agar Tiongkok berada di garis terdepan dan siap bersaing di pasar global. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah Tiongkok mengimplementasikannya dalam

¹² Digital Economy Growth Requires Global Efforts,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_281475965403618.htm

¹³ G20 Blue Print On Inovative Growth.

¹⁴ Yongqi Hu. 2017. ‘Made in China 2025’ policy Boosted by Manufacturing Update. China Daily. Tersedia dalam <http://english.gov.cn/policies/>

inisiatif kebijakan *Internet Plus* yang dibangun dari motivasi untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara industri ekonomi besar menjadi negara industri ekonomi kuat melalui strategi *Internet Plus* yakni salah satunya yaitu: inisiatif untuk menghentikan ketergantungan pada inovasi teknologi non-domestik.¹⁵

Inisiatif yang tertuang dalam Kebijakan *Internet Plus* untuk menghentikan ketergantungan pada inovasi teknologi non-domestik diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok dengan memblokir segala akses internet atau media sosial yang bukan berasal dari Tiongkok yakni seperti: *Google, Facebook, Youtube, Whatsapp, Twitter* dan *Instagram* yang notabene semua sosial media tersebut berpusat di Silicon Valley, Amerika Serikat.¹⁶

Berangkat dari salah satu inisiatif yang telah tertuang dalam kebijakan *Internet Plus* yakni menghentikan ketergantungan pada inovasi teknologi non-domestik, tampaknya pemerintah Tiongkok telah melenceng dari komitmen mereka di era ekonomi digital. Seperti yang dikatakan oleh Ren Xianliang, wakil direktur *Cyberspace Administration of China* yakni “*China is committed to developing a digital economy with openness and shared benefits and the rapid development of the country’s internet is visible proof of its success*”¹⁷ atau Tiongkok telah berkomitmen bahwa mereka akan mengembangkan

¹⁵China Telecom Americas

¹⁶Eka Shantika, “Selain Whatsapp, 8 Aplikasi ini juga di Blokir di Cina,” CNN Indonesia, September 26, 2017. Diakses pada 13 Desember 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi.html>

¹⁷ Ouyang Shijia, “Nation to Further boost digital economy”, The State Council The People’s Republic of China, November 2017. Diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_28147594670892.htm

perekonomian di era digital dengan terbuka demi keuntungan bersama. Selain itu, Tiongkok juga menandatangani kesepakatan dalam *G-20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative* yakni Tiongkok telah sepakat untuk berinovasi, kemitraan, sinergi, fleksibilitas, inklusi atau keterbukaan serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis untuk saling percaya dalam memperluas arus informasi dan keamanan.¹⁸ Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dengan memblokir berbagai macam media sosial non-domestik berbanding terbalik dan menunjukkan bahwa Tiongkok telah melanggar komitmen mereka itu sendiri yaitu untuk saling percaya dan terbuka demi keuntungan bersama.

Five Years Plan ke-13 yang telah dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan *Internet Plus* dan juga *Made in China 2025* dianggap terus menimbulkan ancaman besar bagi keamanan ekonomi AS. Sehingga pada dalam nota kesepahaman (MoU) September 2015 pasca beberapa bulan diimplementasikannya, Amerika Serikat dan Tiongkok berjanji bahwa pemerintah negara itu tidak akan melakukan atau secara sadar mendukung pencurian kekayaan intelektual cyber, termasuk rahasia dagang atau informasi bisnis rahasia lainnya, dengan maksud memberikan keunggulan kompetitif untuk perusahaan atau sektor komersial.¹⁹

¹⁸Nation to Further Boost Digital Economy,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_281475946708926.htm

¹⁹ White House, *Fact Sheet: President Xi Jinping’s State Visit to the United States*, September 25, 2015.

Kebijakan *Internet Plus* adalah salah satu kebijakan yang berfokus pada pengembangan internet di era digital agar Tiongkok menjadi negara dengan industri manufaktur yang kuat di era modern. Berbicara terkait internet maka bukan hal yang asing lagi bahwa internet merupakan kebebasan bagi setiap individu di era globalisasi saat ini. Dalam era ekonomi digital, media sosial juga merupakan faktor pendorong kesuksesan perdagangan digital, hal tersebut dikarenakan media sosial merupakan alat bantu utama untuk mempromosikan bisnis di dunia internasional dengan cepat, lintas batas, menghemat biaya, serta memudahkan setiap individu dalam berbelanja online. Namun, pada implementasinya Tiongkok malah menutup dan memblokir segala arus informasi dari luar domestik. Sehingga, dengan dikeluarkannya kebijakan *Internet Plus* oleh pemerintah Tiongkok menimbulkan pertanyaan akan pengaruh kebijakan *Internet Plus* terutama bagi negara mitra dagangnya, salah satunya yakni Amerika Serikat.

United State Trade Representative (USTR) menyatakan bahwa akibat keinginan Beijing untuk memperketat pengawasan pemerintah atas kebebasan berbicara dan sensor internet semakin memburuk di Tiongkok. Pada bulan April 2016, USTR mencantumkan sensor internet Tiongkok dalam Perkiraan Perdagangan Nasional 2016 tentang hambatan perdagangan asing sebagai beban yang begitu signifikan pada pemasok asing yang ingin berbisnis di Tiongkok. USTR mencatat bahwa pembatasan internet Tiongkok

mempengaruhi penyedia konten Internet asing dan bisnis yang bergantung pada layanan internet untuk operasi perusahaan mereka.²⁰

Pemerintah Tiongkok mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkuat kendali atas internet dengan mengeluarkan peraturan baru yang membatasi akses pasar untuk konten online yang bernilai miliaran dolar di Tiongkok. Pada bulan Februari 2016, administrasi Tiongkok yang berwenang untuk pers, publikasi, radio, film, dan televisi merilis peraturan administratif untuk layanan penerbitan *online*, yang membatasi perusahaan asing termasuk usaha patungan asing yang mendistribusikan konten *online* di Tiongkok kecuali atas dasar proyek yang sedang dijalankan dengan mitra Tiongkok.²¹

Pertanyaan akan keberlanjutan akan hubungan kerjasama kedua negara tersebut muncul dikarenakan keseluruhan media sosial yang pemerintah Tiongkok blokir ialah berasal dari Amerika Serikat. Tercatat sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia serta sebagai negara anggota G-20, Tiongkok dan Amerika Serikat telah menandatangani beberapa kesepakatan kerjasama di bidang perdagangan.²² Sehingga adanya kebijakan *Internet Plus* beserta aturan-aturan yang mengikat di dalamnya, menimbulkan pertanyaan akan

²⁰ U.S. Trade Representative, *2016 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*, March 2016, hal 91.

²¹ US-China Business Council, "Translation of Provisions on Network Publication Services Administration."

²² China International Electronic Centre, "*China FTA Network*". Diakses pada 07 Agustus 2017. Tersedia dalam <http://fta.mofcom.gov.cn/English/index.html>

kelanjutan hubungan kedua negara khususnya dalam bidang kerjasama perdagangan.

Adanya beberapa regulasi yang tertuang dalam kebijakan *internet plus* juga berpengaruh pengaruh pada para pengusaha maupun investor asing yang beroperasi di Tiongkok. Secara resmi, Ren Xianliang, wakil direktur *Cyberspace Administration of China* menyatakan “*We welcome global internet companies to develop their businesses in China. But this is based on the premise that they will obey the local laws*”²³ atau dengan kata lain Tiongkok membuka pintu kerjasama dengan perusahaan internet atau teknologi asing yang ingin beroperasi di Tiongkok, namun dengan syarat mereka harus tunduk dibawah regulasi atau kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah Tiongkok.

Aturan-aturan atau regulasi tersebut dirasakan oleh perusahaan asing asal Amerika Serikat yang bergerak dibidang teknologi, yakni apabila mereka ingin tetap beroperasi di Tiongkok, maka mereka harus berbagi teknologi atau disebut dengan istilah transfer teknologi canggih untuk pertukaran akses pasar jangka pendek dengan perusahaan Tiongkok guna keberhasilan produk dari perusahaan asal Tiongkok itu sendiri.²⁴ Tercatat bahwa Amerika Serikat merupakan negara utama pemasok *microchip* yaitu komponen paling penting dalam keberhasilan produk keluaran ZTE yaitu perusahaan yang bergerak di

²³ *Nation to Further Boost Digital Economy,*” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_281475946708926.htm

²⁴ European Union Chamber of Commerce in China. *China Manufacturing 2025*. 2017. European Union Report. Diakses pada 09 September 2018. www.europeanchamber.com.cn

bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) asal Tiongkok. Hal tersebut membuat Amerika Serikat mengalami tekanan kuat untuk menyerahkan teknologi canggih dalam rangka pertukaran pasar jangka pendek di bidang industri robotik dan teknologi.²⁵

Bagi perusahaan asing asal Amerika Serikat, berbagi teknologi mereka dengan perusahaan asal Tiongkok bisa dikatakan sebagai sesuatu yang merugikan, hal ini dikarenakan ketika ZTE atau perusahaan-perusahaan domestik berhasil dalam pembuatan produknya terutama “ponsel pintar”, maka penjualan produk ZTE akan meningkat pula, sehingga produk non-domestik akan mengalami penurunan di Tiongkok, karena produk-produk dalam negeri akan dijual lebih murah di bandingkan dengan produk luar negeri.²⁶ Sehingga Tiongkok akan sepenuhnya bebas dari inovasi teknologi non-domestik. Namun di sisi lain apabila perusahaan asing menolak untuk berbagi teknologi mereka, maka mereka juga tidak dapat bertahan di pasar Tiongkok karena adanya relugasi yang telah pemerintah Tiongkok tetapkan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi dilema tersendiri bagi perusahaan asing yang ingin tetap bertahan di industri Tiongkok.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terlihat beberapa *gap* yang muncul antara Tiongkok dan Amerika Serikat setelah di

²⁵ Ibid

²⁶ Bintoro Agung, “ZTE Kalang Kabut Hadapi Sanksi Pemerintah Amerika Serikat,” CCN Indonesia, April 24, 2018. Diakses pada 07 Agustus 2018, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20180426174500-185-293877>

keluarkannya kebijakan *Internet Plus* oleh pemerintah Tiongkok yang menimbulkan pertanyaan akan bagaimanakah hubungan kedua negara di bidang perdagangan setelah Tiongkok melenceng dari komitmen mereka dan menerapkan beberapa regulasi tidak adil yang tertuang dalam kebijakan *Internet Plus*. Sehingga, skripsi ini akan mengambil judul **“Hubungan Kerjasama Dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah Implementasi Kebijakan *Internet Plus*.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Inisiatif yang tertuang dalam implementasi kebijakan *Internet Plus* Tiongkok menyebabkan kerugian untuk negara mitra dagangnya khususnya Amerika Serikat. Kebijakan *Internet Plus* menjadi alat yang digunakan oleh Pemerintah Tiongkok guna mencapai tujuannya, yang dalam jangka waktu lima tahun menginginkan modernisasi dan reformasi industri manufaktur tradisional ke industri manufaktur modern agar pasar Tiongkok siap bersaing ke dalam pasar global. Ambisi yang ada dalam kebijakan tersebut, membuat pemerintah Tiongkok melakukan serangkaian praktik perdagangan yang tidak adil terhadap negara mitra dagangnya melalui beberapa regulasi yang ada dalam Kebijakan *Internet Plus* khususnya intervensi yang secara berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Sehingga muncul berbagai pertanyaan akan kelanjutan hubungan kerjasama antara Tiongkok-Amerika Serikat selanjutnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan

permasalahan; **Bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan *Internet-Plus* Tiongkok terhadap hubungan kerjasama perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan kerjasama perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pasca di implementasikannya kebijakan *internet plus* oleh Pemerintah Tiongkok.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

- a. Turut mengembangkan teori-teori Hubungan Internasional terutama Teori Ekonomi Politik Internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi bahan masukan dalam mengembangkan kajian ekonomi politik internasional, menambah pengetahuan, dan dapat bermanfaat bagi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan *Internet Plus* pada umumnya dan pengaruhnya terhadap hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan dinamika kebijakan *Internet Plus* yang diberlakukan oleh Pemerintah Tiongkok.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para pemangku kebijakan baik dari pemerintah Tiongkok maupun pemerintah Amerika Serikat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait perdagangan selanjutnya.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pelaku bisnis baik dari Tiongkok maupun Amerika Serikat yang ingin mengembangkan dan menjalankan bisnisnya di Tiongkok agar mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok supaya siap dalam menyusun strategi perdagangan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tema penelitian yang sama tentang pengaruh *Internet Plus* di dalam ekonomi digital sebelumnya telah dilakukan oleh McKinsey Institute dengan judul *China's Digital Economy A Leading Global Force*, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa momentum globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi yang mulai berkembang akan bergeser secara cepat ke arah Timur, hal tersebut dibuktikan dengan perusahaan teknologi raksasa seperti, *Amazon, Apple, Facebook* dan *Google* telah berusaha masuk ke dalamnya, namun hal tersebut sulit dilakukan karena adanya pengurangan akses masuk oleh pemerintah Tiongkok sendiri.

Adanya penutupan akses tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah Tiongkok dalam mengembangkan teknologi domestiknya sendiri agar bisa

maju di negaranya sendiri, seperti, *Bidu*, *Alibaba* dan *Tencent*. Hasil penelitian tersebut dijelaskan pula peralihan ke ekonomi digital telah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan lapangan kerja di berbagai sector, namun adanya perubahan kearah teknologi yang lebih maju juga turut membuat teknologi tradisional tertinggal dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki keahlian untuk itu akan ikut tertinggal pula.²⁷

Kesamaan penelitian yang dilakukan antara peneliti dan juga penelitian yang dilakukan oleh McKinsey Institute adalah serupa membahas mengenai bagaimana memang digital ekonomi Tiongkok ini menjadi salah satu motivasi negara lain untuk terus mengembangkan ekonomi digital. Adapun perbedaan dari Penelitian tersebut dengan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah, dimana penulis akan mengupas lebih jauh bagaimana Digital Ekonomi Tiongkok yang turut mempengaruhi Pemerintah Tiongkok dalam mengambil kebijakan *Internet Plus* yang berimbang pada respon Amerika Serikat selaku mitra dagang dan sama-sama sebagai negara anggota dalam G-20.

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Zhen Zhao, Wei Xiong, Jingxuan Fang dengan judul *Impact of Internet Plus to China Development*. Penelitian

²⁷ Woetzel Jonathan dan Seong Jeongmin, eds., *China's Digital Economy A Leading Global Force* (United State: McKinsey Global Institute, 2017). Diakses pada 13 Desember 2017, <http://DigitalEconomyReportMcKinsey.pdf>

tersebut menghasilkan bahwa dengan kecepatan teknologi yang relatif tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok saat ini, internet merupakan salah satu alat yang paling tepat, efisien dan produktif sebagai platform bisnis dan kehidupan sehari-hari. Walaupun Tiongkok per kapita GDP tidak tinggi, dengan populasi besar dan berkelanjutan yang relatif tinggi, laju pertumbuhan ekonomi pada nilai jumlah total GDP Tiongkok akan meningkat dengan sangat cepat.

Dalam banyak aspek-aspek ekonomi, perkembangan bisnis akan terbantu dengan adanya *internet plus*. *Internet Plus* akan menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi Tiongkok. Dengan adanya *internet plus* akan menjadi sebagai bagian dari strategi nasional berkelanjutan, Tiongkok akan diprediksi sebagai sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia.²⁸

Kesamaan penelitian yang dilakukan antara penulis dan juga penelitian yang dilakukan oleh Zhen Zhao, Wei Xiong, Jingxuan Fang adalah serupa membahas tentang pengaruh *Internet Plus*. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis akan mengupas lebih jauh bagaimana digital ekonomi Tiongkok yang turut mempengaruhi pemerintah Tiongkok dalam mengambil

²⁸ Zhen Zhao et al., "Impact of Internet Plus to China Development," Journal of International Business School, University of International Business and Economics 7, No. 933-944 (2016), diakses pada 13 desember 2017. <http://www.scirp.org/journal/me> <http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.79096.pdf>

kebijakan *Internet Plus* yang berimbang pada respon Amerika Serikat selaku mitra dagang dan sama-sama sebagai negara anggota dalam *G-20*.

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh tim peneliti dari pemerintahan Tiongkok yang berjudul *China-US Economic and Trade Relations*. Dimana hasil dari penelitian ini adalah dimana digital ekonomi merupakan momentum tepat untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kerjasama demi diperoleh keuntungan *win-win*. Pada saat yang sama pula Tiongkok dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk melakukan restrukturasi ekonomi yang membawa kesempatan baru untuk kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral. Perkembangan Cina dan AS dapat melengkapi dan mempromosikan satu sama lain dan kedua belah pihak akan sama-sama memperoleh keuntungan atau *win win*.²⁹

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti pemerintah Tiongkok dengan peneliti adalah serupa membahas tentang bagaimana hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana peneliti akan menghubungkan studi kasus yang ada saat ini terhadap pengaruhnya ke hubungan perdagangan antara Tiongkok dan

²⁹ Ministry of Commerce of the People's Republic of China, "Research Report on China-US Economic and Trade Relations, 2017," Ministry of Commerce of the People's Republic of China, <http://www.china-usresearchreport.pdf> (diakses pada 13 Desember 2017)

Amerika Serikat di era ekonomi digital saat ini, yang sebelumnya belum dibahas oleh penelitian yang dilakukan oleh Tim Research Tiongkok.

4. Penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad Yusrizal dari Universitas Riau dengan judul “Dampak Implementasi Kebijakan *The Great Firewall* oleh Pemerintah Cina terhadap Aktivitas *Google INC di Cina (2006-1012)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca diimplementasikannya kebijakan *The Great Firewall* oleh pemerintah Tiongkok *search engine* terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat yakni *Goggle* terpaksa harus di blokir oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2002 akibat adanya intimidasi oleh pemerintah Tiongkok pasca diimplementasikannya kebijakan tersebut. Selain karena adanya kebijakan *The Great Firewall*, di blokirnya *google* oleh pemerintah Tiongkok juga karena *google* tetap menjalankan prinsipnya yakni keterbukaan terhadap sistem informasi di era globalisasi. Hal tersebut akhirnya membuat perusahaan *google* menyerah pada pemerintah Tiongkok dan meninggalkan Tiongkok pada tahun 2010.

Kebijakan *The Great Firewall* sendiri merupakan kebijakan dibidang komunikasi dan informasi yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok dengan membatasi arus informasi dari luarTiongkok dengan tujuan agar mental warga negara Tiongkok tidak rusak dan terpengaruh akan informasi dari luar Tiongkok, dengan kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok untuk menjaga *image* pemerintah Tiongkok itu sendiri. Hal tersebutlah yang memaksa akhirnya *google*

meninggalkan pasar Tiongkok. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pemblokiran tersebut berimbas pada perusahaan *google* yang kehilangan seluruh pansa pasarnya di Tiongkok.³⁰

5. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian milik Muhammad Yusrizal ini adalah peneliti akan mengupas lebih jauh akan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan *Internet Plus* yakni kebijakan yang juga mirip dengan kebijakan *The Great Firewall* dan mencari tahu akan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat pasca ditetapkannya kebijakan tersebut yang tampak merugikan salah satu pihak yakni Amerika Serikat. Sementara itu, kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni serupa melihat pengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok yang berimbas pada kerugian negara lain
6. Penelitian yang baru-baru ini dilakukan terkait kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok juga dilakukan oleh Renata Thiebaut, dari Universitas Harvard pada oktober 2018 yang mengambil judul *An Analysis of the U.S.-China Trade War: How the Section 301 China Intellectual Property Case May Impact New Directivies to Promote the 'Made in Chia 2025'* penelitian ini membahas terkait perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang lebih fokus secara mendalam terkait pemicu utama perselisihan melalui bagian 301 kekayaan intelektual Tiongkok.

³⁰ Muhammad Yuzrizal. 2014. Dampak Implementasi Kebijakan *The Great Firewall* terhadap aktivitas google inc di Cina. Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014

perbedaan penelitian yang dilakukan antara Renata Thiebaut dan penulis adalah penulis lebih fokus terhadap pengaruh kebijakan yang diimplementasikan oleh Tiongkok terhadap hubungan kerjasama dagang antar kedua negara yang mengakibatkan terjadinya perang dagang. Sementara Renata Thiebaut lebih fokus untuk menganalisis perang dagang melalui laporan yang dikeluarkan oleh bagian 301 dari USTR terkait pencurian hak kekayaan intelektual.

Meskipun terdapat persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan para peneliti sebelumnya, peneliti telah yakin bahwa penelitian ini akan berbeda dari penelitian sebelumnya. Dimana, pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada studi kasus yang masih hangat yang kemudian peneliti akan lebih focus terhadap satu kebijakan yang belum pernah diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. *Internet-Plus*

Internet Plus merupakan sebuah Kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Tiongkok dalam upayanya meningkatkan perekonomian di Era Digital. Kebijakan *Internet Plus Governance* pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Cina, Li Keqiang dan mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Kebijakan ini dibuat pemerintah cina untuk mengubah, memodernisasi industri manufaktur serta melengkapi industri tradisional untuk berinovasi agar siap bergabung dalam pasar internasional di era

digital. Kebijakan *Internet Plus* merupakan rencana lima tahun pemerintah Cina untuk mengintegrasikan internet seluler seperti komputasi awan (*Cloud*), data besar, *Internet of Things*, dengan berbagai industri mulai dari manufaktur modern hingga perdagangan, internet banking atau pembayaran online, pertanian, jasa serta pengembangan *e-commerce*. Kebijakan *Internet Plus* juga merupakan upaya pemerintah cina untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintah agar lebih transparan.³¹ *Internet Plus* juga merupakan upaya pemerintah Tiongkok untuk menghubungkan industry manufaktur dengan teknologi atau yang disebut dengan *Internet of Things* (IoT).

2. Ekonomi Digital

Ekonomi Digital merupakan sebuah fenomena yang begitu kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Konsep mengenai digital ekonomi pertama kali diperkenalkan Tapscott, konsep ini menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil

³¹ Pivot to Internet Plus: Molding China's Digital Economy for Economic Restructuring?. Hong, Yu. 2017. *International Journal of Communication* No. 1486–1506. Hal 04. Tersedia dalam <http://ijoc.org./index.php/ijoc/article/viewfile/6105/1990.pdf> diakses pada 11 Desember 2017

diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas *e-commerce* antar perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet.

Sedangkan konsep ekonomi digital lainnya adalah digitalisasi informasi dan infrastruktur TIK. Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan dampak global teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya pada internet, tetapi juga pada bidang ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi dan dampaknya pada ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ekonomi digital adalah sektor ekonomi meliputi barang-barang dan jasa-jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada teknologi digital.³²

3. Perdagangan Digital (*Digital Trade*)

Tidak ada definisi pasti tentang apakah itu Perdagangan Digital (*Digital Trade*). Namun, G20 dalam laporan Organization for Economic Cooperation and Development (*OECD*) telah mendefinisikan Perdagangan digital:

In many respects digital trade is not in and of itself new. But digital trade also presents significant challenges for policy makers and businesses.

³² Espinel, Victoria A. The Digital Economy: What is it and How Will it Transform our Lives. 2016. World Economic Forum Research Paper.

For example the intangible nature of digitalised services has created strong fiscal incentives for their source (country of origin) to be located wherever that may be most advantageous. Digital trade is also further blurring already grey distinctions between conventional cross-border trade in services (GATS).³³

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa perdagangan digital merupakan sebuah perdagangan yang tidak terbatas tempat, bisa dilakukan secara fisik maupun digital. Adapun transaksi yang diperjual belikan adalah barang dan jasa, sedangkan actor yang mempengaruhi adanya perdagangan digital adalah, negara, konsumen dan juga pelaku bisnis.

4. Fluktuatif

Fluktuatif merupakan gambaran atau gejala sebuah kondisi yang menunjukkan keadaan tidak stabil, dimana kondisi tersebut menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Penggunaan kata fluktuatif umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi sebuah pasar perekonomian di sebuah lingkungan masyarakat. Fluktuasi juga dapat di artikan sebagai gambaran sebuah gejala yang menunjukkan turun naiknya sebuah kondisi pasar karena ketidaktetapan dan juga guncangan.³⁴

³³ Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*). 2016. Towards A G20 Initiative On Measuring Digital Trade: Mapping Challenges And Framing The Way Forward. Research Paper.pdf

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata Dasar Fluktuasi. Tersedia dalam <https://kbbi.web.id/fluktuasi.html>. Diakses pada 06 Februari 2019

Sementara itu kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam hal tingkat pendapatan, kesempatan kerja dan terutama kestabilan pada tingkat harga-harga barang secara umum. Dalam pengertian yang lebih realistis perekonomian yang stabil bukanlah berarti suatu perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa booming terus menerus, akan tetapi suatu kondisi yang fluktuasi variable ekonomi terutama harga-harga komoditi secara umum dan tingkat pendapatan bergerak/berubah dalam kondisi yang wajar.³⁵

Konsep fluktuasi dapat membantu peneliti dalam mengukur bagaimana hubungan kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dikarenakan konsep ini sesuai dengan dinamika hubungan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

G. ARGUMENTASI UTAMA

Untuk mengarahkan penelitian ini, peneliti akan memaparkan argumentasi utama penelitian. Argumentasi penelitian tersebut akan diuji kebenarannya dan hasil dari uji kebenaran argumentasi utama akan dapat digunakan sebagaimana manfaat yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Argumentasi utama merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan dan bersifat lemah tingkat kebenarannya. Argumentasi utama juga diartikan sebagai kesimpulan yang sifatnya sementara. Sesuai dengan

³⁵ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro* .2013. Mitra Wacana Media. Hal 280

masalah yang akan diteliti, maka argumentasi utama peneliti dalam penelitian ini adalah; **Implementasi Kebijakan *Internet Plus* membuat hubungan kerjasama perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat menjadi fluktuatif.**

Argumentasi utama tersebut peneliti paparkan setelah mengupas satu per satu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim penelitian lainnya, dimana hasil ataupun kesimpulan tampak bahwa pasca diimplementasikannya kebijakan *The Great Firewall* yaitu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Tiongkok untuk membatasi akses informasi di era globalisasi, dimana pemerintah Tiongkok akan mensensor serta memblokir segala situs internet non domestik yang di rasa akan mengganggu stabilitas keamanan nasional Tiongkok. Kebijakan tersebut berhasil membuat perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yakni *Google* meninggalkan Tiongkok dan berimbas pada *Google* yang kehilangan pangsa pasarnya di Tiongkok secara permanen.

Kebijakan *The Great Firewall* peneliti gunakan sebagai acuan dalam membunyikan argumentasi utama ini dikarenakan dari implementasi kebijakan tersebut tampak apabila di era globalisasi saat ini dimana internet merupakan sebuah kebebasan dalam warga negara dalam mendapatkan informasi dari seluruh dunia, namun pemerintah Tiongkok justru menutup segala arus informasi yang membuat kerugian pada beberapa pihak yakni *Goggle* salah satu contohnya.

Dari penelitian sebelumnya tersebut maka akan sedikit tergambarkan apabila dalam implementasi kebijakan *Internet Plus* yakni dimana pemerintah

Tiongkok berambisi untuk membawa Tiongkok menjadi negara dengan industri manufaktur berkualitas tinggi dengan memanfaatkan apa yang dibawa oleh globalisasi demi mendapatkan keuntungan di era ekonomi digital. Namun, atas beberapa regulasi yang ada dalam kebijakan *Interet Plus* membuat kerugian bagi negara mitra dagang Tiongkok yakni Amerika Serikat, sehingga kesimpulan dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti lain tentang kebijakan yang hampir serupa dengan *internet plus* cukup menggambarkan apa yang akan terjadi pada hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pasca diimplementasikannya kebijakan *interet plus*.

H. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah peneliti akan menggunakan jenis Metode Kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁶

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

³⁶ Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai hubungan kerjasama perdagangan Tiongkok dan Amerika Serikat pasca Tiongkok mengimplementasikan kebijakan *internet plus* secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara atas adanya inisiatif yang ada dalam Kebijakan *internet plus*.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga hal dalam analisis data kualitatif: 1) Reduksi data meliputi proses penyederhanaan dan abstraksi, 2) Penyajian data yang bisa disajikan dalam bentuk matriks; grafik; jaringan; bagan, 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi. Metode kualitatif merujuk pada studi literatur dari berbagai penelitian empiris dengan topik serupa yang telah dilakukan sebelumnya pada area penelitian berbeda. Di dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari pada objek penelitian belum jelas dan belum pasti pula masalahnya, sumber datanya, serta hasil yang diharapkan. Rancangan penelitian hanya bersifat sementara, sedangkan perkembangan dari penelitian akan mulai nampak ketika memasuki tahapan objek penelitian.

Didalam penelitian kualitatif memandang realitas itu bersifat menyeluruh, dinamis, tidak dapat dipisahkan kedalam variable-variabel

penelitian (saling berkaitan).³⁷ Dalam pandangan Sukmadinata menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa objek bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.³⁸

Walaupun penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sederhana, namun sistematis tentang fakta-fakta dan karakteristik objek atau fenomena dan subjek yang tengah diteliti secara tepat. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, metode penelitian deskriptif juga banyak dilakukan oleh para peneliti karena beberapa alasan.

Pertama, dari pengamatan empiris dilakukan bentuk deskriptif.

Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi

³⁷ Sugiyono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. ALFABETA

³⁸ Ikbar, Yanuar. 2014. Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung. PT Refika Aditama.

permasalahan yang berkaitan dengan bidang kependidikan maupun tingkah laku manusia. *Ketiga*, penelitian deskriptif pada umumnya menarik para peneliti pemula, karena bentuknya sangat sederhana dengan mudah di pahami tanpa perlu memerlukan teknik kuantifikasi yang rumit. *Keempat*, karena penelitian ini sebenarnya juga dapat ditampilkan dalam bentuk yang kompleks, jika ditambahkan dengan konsep analitis. Sehingga Jenis penelitian kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini dipilih karena dirasa mewakili hasil data yang telah penulis peroleh terkait penelitian **Hubungan Perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat Pasca Implementasi Kebijakan *Internet Plus***.

Dalam hal ini, peneliti kemudian menggunakan data sekunder sebagai pendukung analisis data. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari:

1. Berbagai jenis buku yang menunjang pengumpulan data
2. Thesis
3. Jurnal
4. Laporan penelitian terdahulu
5. Dokumen resmi, dokumen perjanjian kerjasama
6. Situs pemerintah

7. Media cetak maupun online

2. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian mengenai kerjasama perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok paca implementasi kebijakan *internet plus* di dalamnya menggunakan tahapan berfikir, pertama bahwa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian akan dicarikan jawaban sementara nya melalui situs-situs resmi yang terkait dengan kebijakan *internet plus* dan kerjasama Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua, jawaban akan rumusan permasalahan tersebut maupun rumusan masalah yang belum dapat dipecahkan melalui telah situs-situs resmi kedua negara baik Tiongkok maupun Amerika Serikat. Ketiga, data yang didapatkan akan melewati tahap analisis data versi Miles dan Huberman yakni: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Pengambilan Kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang dijadikan referensi ialah buku, artikel, laporan tahunan, berita baik dalam media cetak maupun internet. Peneliti juga tetap menggunakan data primer seperti laporan, pidato, ataupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak otoritatif Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Hamidi, teknik atau metode dokumentasi adalah

informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perseorangan.³⁹ Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya monumental dari seseorang.⁴⁰ Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak yang membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang diteliti.

4. Sistematika Penulisan Skripsi

Bentuk dari hasil penelitian akan disusun menjadi lima bab. Pada bab pertama, peneliti akan menempatkan gambaran awal mengenai kebijakan *Internet-Plus* dan kaitannya dengan kerjasama perdagangan yang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum tentang pola pikir seluruh masalah yang akan diteliti yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan konseptual, dan sistematika pembahasan.

³⁹ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004). 72

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

Bab II Gambaran Umum Mengenai Kebijakan *Internet Plus*.

Pada Bab ini peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kebijakan *Internet Plus* dan pengaruhnya terhadap negara mitra dagang Tiongkok.

Bab III Hubungan Dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus*.

Dalam bab ini peneliti akan bagaimanakan dinamika hubungan dagang antara Amerika serikat dengan Tiongkok sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus*.

Bab IV Penyajian Data. Dalam bab ini setelah melakukan penyajian data, peneliti menganalisis data dengan teknik analisis data yang telah dipaparkan dalam metode penelitian serta melakukan penyajian data yang berhasil ditemukan selama peneliti melakukan penelitian di lapangan. Bukti-bukti dari wawancara dan hasil selama mengumpulkan data di lapangan akan dijelaskan pada bab ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab terakhir yakni bab v peneliti menyajikan kesimpulan atas hasil yang didapatkannya selama di lapangan. Selain itu, dalam bab ini peneliti juga akan memberikan saran bagi perbaikan penelitian-penelitian serupa di waktu mendatang.

5. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan dari mencari sumber data hinggakan proses *Finishing* adalah bulan April hingga bulan Juli. Jadwal penelitian tersebut akan tertuang pada Tabel yang tersaji dibawah ini:

Tabel Rencana Kegiatan Penelitian

| Kegiatan | 2018-2019 | | | |
|--|-----------|-----|------|--------------|
| | April | Mei | Juni | Juli-Januari |
| Pengajuan Judul | √ | | | |
| Bimbingan | √ | | | |
| Seminar Proposal | | √ | | |
| Bimbingan dan Proses Penelitian | √ | √ | √ | √ |
| Sidang Skripsi | | | | √ |

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut

Patton, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”.⁴¹

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁴²

A. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

B. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

⁴¹ Moleong, Lexy. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴² Sugiono. 2010. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung. ALFABETA

1. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

2. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan

menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode yang didukung dengan studi dokumentasi.

7. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Data yang dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif ialah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴³ Uji keabsahan data dalam penelitian ini dengan ketekunan pengamatan.

Ketekunan pengamatan berarti peneliti meningkatkan pengamatan dengan lebih cermat dan teliti. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat dicatat secara pasti dan sistematis. Dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah mengamati kebijakan tertentu.

Ketekunan pengamatan dirasa amat perlu untuk memastikan data yang diperoleh berupa kebenaran. Dalam ketekunan pengamatan ini, peneliti selama kurun waktu \pm 5bulan yakni sekitar bulan juni sampai dengan bulan oktober tahun 2018. Ketekunan pengamatan dilakukan pada saat memasuki lapangan dan di luar lapangan. Pada saat memasuki lapangan, peneliti meningkatkan kecermatan dan ketelitian dengan cara memperhatikan dengan seksama segala ucapan, argumen, dan tingkah laku informan

⁴³ Sugiyono, Ibid, 269.

langkah dan strategi pemerintah Tiongkok untuk membawa negara tersebut menjadi negara kuat di era globalisasi melalui serangkaian kebijakan untuk bertahan dan terus berkembang dengan mengimplementasikan kebijakan *Internet Plus*. Di bawah ini merupakan tabel tingkat pertumbuhan pengguna internet di Tiongkok pada tahun 2010 hingga 2015 yakni sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus*.⁴⁵

Tabel 2.1:
Tingkat Pertumbuhan Pengguna Internet di Tiongkok Tahun 2010-2015



Sumber: South China Morning Post, 2015

Dari tabel pertumbuhan pengguna internet di Tiongkok pada tahun 2010 hingga 2015 yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa pertumbuhan pengguna

⁴⁵ The South China Morning Post. *There area 668 million internet users in China*. Diakses pada 09 september 2018. Tersedia dalam <http://www.scmp.com/tech/socialgadgets.html>

internet di Tiongkok terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sehingga, strategi *Internet Plus* yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok terasa tepat untuk membawa negara tersebut menjadi negara kuat di tengah persaingan global saat ini dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Diimplementasikannya strategi kebijakan *Internet Plus* oleh pemerintah Tiongkok bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan perkembangan internet Tiongkok begitu menarik perhatian vesar di kalangan asing. Menariknya perhatian asing untuk internet di Tiongkok ini dikarenakan rekor penjualan dalam perdagangan digital atau online Tiongkok melonjak naik secara drastis pada tahun 2016.⁴⁶ Namun, berbagai pertanyaan muncul dari berbagai pengamat ekonomi maupun politik akan kebijakan yang ada di bawah payung besar *China 4.0* yang mendapatkan kontrol penuh dari pemerintah ini.

Pada akhir tahun 2015, perwakilan dari seluruh perusahaan IT terbesar di dunia berkumpul dalam *World Internet Conference* yang di senggarakan di Shanghai, Tiongkok. Dalam acara ini presiden Xi Jinping menyampaikan pidato singkatnya yang menegaskan bahwa:

“Our goals is to make the development of the internet benefit the 1.3 billion Chinese people to further benefit people all over the world coverage. By 2020 basic boardband will cover rural villages in China through the last kilometer network infrastructure project making internet accessible to more people. China stands

⁴⁶ Ibid

*ready to work together with the all parties to increase capital investment strengthen technical support to promote global network infrastructure construction and let more people in developing countries share the development opportunities brought by the internet. He's also said that, all countries should join hands to curb abuse of information technology against internet surveillance and the cyber attacks against cyberspace arms race. And to global internet tech companies he hinted at a big potential in China's market. China is implementing an action plan name "Internet Plus" to promote the establishment of a digital China and shared economy encouraging various internet based innovation to enhance quality and efficiency of development,*⁴⁷

Pidato yang disampaikan oleh presiden Xi Jinping terkait kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok guna mendorong pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Michael Porter yakni *Competitive Advantage* dimana dalam teorinya Michael Porter berpendapat bahwa dua faktor penting guna mendukung keunggulan kompetitif sebuah negara adalah: 1) Faktor kesempatan dan 2) Faktor pemerintah melalui strategi dan kebijakan yang dikeluarkan.⁴⁸ Selain itu, peran pemerintah menjadi sentral dalam penciptaan lingkungan nasional yang kondusif keunggulan suatu negara dalam ekonomi. Bahkan Porter mengatakan peran pemerintah menjadi variabel akhir yang menentukan keunggulan kompetitif sebuah negara.⁴⁹

⁴⁷ CGTN Africa. 2015. Diakses pada 17 Oktober 2018, <https://youtu.be/Naav0plQhFSw>

⁴⁸ Michael Porter, *"The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction"*, (New York: The Free Press, 1990), 111.

⁴⁹ Michael Porter, *Ibid*, 170.

Peran yang tersebut diatas dapat dilihat dari bagaimana pola dari kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur masing-masing faktor penentu. Faktor kondisi sangat dipengaruhi dengan adanya subsidi pemerintah, kebijakan-kebijakan terhadap pasar modal, kebijakan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Pemerintah memainkan peran dalam membentuk standar produk lokal atau regulasi yang memberikan mandat dan mempengaruhi kebutuhan dari konsumen melalui badan-badan pemerintahan yang terkait.

Mendukung kerjasama internasional, kedaulatan nasional, perluasan infrastruktur global, dan mempromosikan ekonomi digital, hal tersebut justru banyak menuai pertanyaan serta kritik dari beberapa pihak. Apabila dilihat dan dipahami secara lebih dekat pidato yang disampaikan oleh presiden Xi Jinping tersebut tampak bahwa pemerintah Tiongkok lebih tertarik dalam memperluas dan melindungi keamanan digital nasional dengan dibutikannya oleh banyak di blokirnya teknologi non domestik dan akan berfokus pada perdagangan digital dalam negeri sendiri. Hal ini membuat kepemimpinan Tiongkok di bawah presiden Xi berusaha untuk mencapai tindakan penyeimbangan politik antara keterbukaan, inovasi teknologi dan kerjasama internasional, dan keamanan dunia maya. Dari adanya hal tersebut maka bisa berarti bahwa kerjasama dengan Tiongkok akan menjadi sulit terutama dalam bidang ekonomi di era digital, karena hak-hak yang harusnya diperoleh oleh perusahaan asing yang

beroperasi di Tiongkok akan mengalami banyak hambatan dengan di berlakukannya kebijakan *Internet plus*.

Cyber Law Security yang baru diadopsi pada tanggal 7 November 2016, menunjukkan bahwa keputusan Tiongkok telah berdampak pada perekonomian global. Bahkan banyak rancangan undang-undang Tiongkok terkait beberapa kebijakan yang dikritik oleh Barat salah satunya adalah kebijakan *Internet Plus* dimana pemerintah Tiongkok menempatkan fokus yang lebih besar pada potensi risiko yang ditimbulkan dari internet dibandingkan dengan fokus dalam membangun kerjasama internasional sesuai komitmen mereka dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional maupun pidato yang disampaikan secara langsung oleh presiden Xi Jinping itu sendiri. Di bawah ini gambaran lebih jauh mengenai inisiatif kebijakan *Internet Plus* dibawah payung besar *Manufacturing 2025 China* yang kemudian menuai banyak kritik dari Barat.

A. STRATEGI *INTERNET PLUS* TIONGKOK

Dunia terus mengalami perkembangan yang diikuti pula dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan perekonomian. Pemerintah Tiongkok terus berupaya untuk bertahan di tengah persaingan global yang ketat dengan negara-negara lainya. Salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada bentuk baru di era globalisasi yakni internet, kebijakan tersebut di beri nama *Internet Plus* atau dijuluki dengan revolusi industri 4.0. Upaya pendigitalisasian Tiongkok melalui

strategi *Internet Plus* ini sendiri merupakan komponen inti dari strategi politik presiden Xi.

Inovasi dibidang digital dan teknologi ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka waktu panjang. Tiongkok memanfaatkan hadirnya globalisasi sebagai kesempatan untuk menyalip pertumbuhan ekonomi negara-negara industri barat demi ambisi menjadi negara adidaya dibidang teknologi informasi (TI).

Internet Plus merupakan model baru dari revolusi industri berdasarkan evolusi internet dengan mengintegrasikan internet seluler kedalam benda-benda manufaktur tradisional maupun modern. Hal tersebut untuk mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang bisnis seperti *E-Commerce*, *Internet Banking*, *M-Commerce* serta sebagai panduan untuk perusahaan Tiongkok dalam meningkatkan kehadiran mereka di pasar internasional. *Internet Plus* juga mewakili sebagai bentuk baru dari ekonomi di era digital dimana pemerintah Tiongkok memfasilitasi secara penuh untuk warga negara Tiongkok maupun pebisnis dalam mengembangkan bisnisnya menggunakan internet sebagai fasilitas mendasar dan alat bantu implementasinya untuk terus berinovasi dan produktif.⁵⁰

⁵⁰ Betty Xu. *Internet Plus Strategy of China*. 2015. Laporan SESEC III. SC Steering Committees ETSI Stakeholders.pdf

Internet Plus mengacu pada penerapan internet dan teknologi informasi dalam industri konvensional atau dengan kata lain bahwa *Internet Plus* merupakan kebijakan sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi Tiongkok di era digital dengan memanfaatkan internet sebagai sumber penggerak utama. Dengan diimplementasikannya kebijakan ini, Pemerintah Tiongkok berusaha untuk mengintegrasikan internet kedalam industri manufaktur tradisional menjadi industri manufaktur modern atau yang biasa disebut dengan *Internet of Things* (IoT).⁵¹

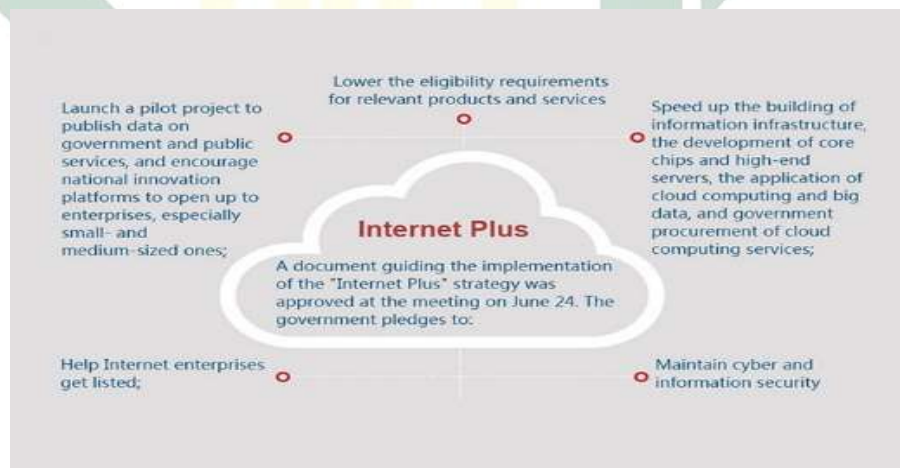
Konsep *Internet Plus* sendiri awalnya diangkat pada tahun 2013 oleh para pengusaha asal Tiongkok sebagai upaya mereka untuk memperluas bisnis mereka ke dalam beberapa sektor jasa agar lebih di kenal dalam pasar global. Kemudian konsep *Internet Plus* secara resmi dijadikan strategi nasional Tiongkok dan dimasukkan ke dalam laporan kerja pemerintah Tiongkok oleh perdana menteri Tiongkok Li Keqiang dan dismpikan kepada kongres rakyat nasional pada 5 Maret 2015.⁵² Lebih jauh, strategi *Internet Plus* merupakan ambisi kuat pemerintah dalam membawa Tiongkok menjadi negara kuat di tengah persaingan global. Kebijakan *Internet Plus* diletakkan dalam posisi yang tinggi dalam kerangka kebijakan pemerintah Tiongkok, hal tersebut tertulis dalam laporan kerja pemerintah

⁵¹ Ibid

⁵² Li Yang. China Internet Plus. 2015. Telegraph United Kingdom. Diakses pada 09 September 2018, <http://telegraph.co.uk/chinawatch>

Tiongkok bahwa *Internet Plus* akan mengubah Tiongkok dari industri berkembang ke industri terkemuka.⁵³

Sementara itu, pemerintah Tiongkok melalui implementasi kebijakan *Internet Plus* akan menargetkan jangka waktu selama lima tahun untuk bisa mencapai keberhasilan dalam mengembangkan industri modern Tiongkok. Strategi untuk menekankan manfaat dari perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini sebagai awal bentuk bisnis baru dan kinerja pemerintah Tiongkok untuk lebih meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas bangsa. Dibawah ini merupakan kerangka awal kebijakan internet dalam laporan kerja pemerintah Tiongkok tahun 2015.⁵⁴



GAMBAR 2.2:

Rencana Aksi Kebijakan *Internet Plus* Tiongkok

Sumber: The State Council Republic of China, 2015

⁵³ Betty Xu. Internet Plus Strategy of China. 2015. Laporan SESEC III. SC Steering Committees ETSI Stakeholders.pdf

⁵⁴ The State Council The People's Republic of China. The official website governance of China

Dari gambar yang telah diuraikan diatas tampak bagaimana awal kerangka kebijakan *Internet Plus* dibentuk, dimana ambisi pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan industri negara melalui internet. Tidak hanya itu, pemerintah Tiongkok dalam rencana aksi strategi *Internet Plus* ini akan siap menggelontorkan dana sebesar 40 miliar yuan (£4,4 miliar) untuk investasi modal demi kesuksesan rencana aksi strategi *Internet Plus*.⁵⁵ Menjadi catatan penting bahwa kebijakan *Internet Plus* merupakan kebijakan yang terintegrasi sepenuhnya dari prakarsa kebijakan *Made in China 2025* Tiongkok, kebijakan *Internet Plus* juga merupakan strategi pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan daya saing bangsa ke dalam pasar global dengan memperbaiki kualitas keseluruhan produk-produk asal Tiongkok demi mencapai keuntungan di bidang ekonomi. Dibawah ini merupakan tabel yang berkaitan dengan kebijakan *China Manufacturing 2025* secara keseluruhan.⁵⁶

⁵⁵ Li Yang. China Internet Plus. 2015. Telegraph United Kingdom. Diakses pada 09 September 2018, <http://telegraph.co.uk/chinawatch>

⁵⁶ U.S. Chamber of Commerce. Made in China 2025: Global Ambitions Built on Local Protections. 2017. United State Chamber of Commerce

Tabel 2.3:
Kebijakan yang Berkesinambungan dengan
Made in China 2025

| Nama Kebijakan | Inisiasi | Tanggal | Catatan |
|---|-----------------|-----------------------|--|
| <p>Pemberitahuan dari Dewan Negara tentang penerbitan Kebijakan Made in China 2025</p> | <p>Negara</p> | <p>08 Maret, 2015</p> | <p>Mereformasi sektor manufaktur, hingga kekayaan hak intelektual</p> |
| <p>Membantu Pemerintah dalam mempromosikan <i>Internet Plus</i></p> | <p>Negara</p> | <p>01 Juli 2015</p> | <p>Bertujuan untuk mengintegrasikan internet, komputasi awan, data besar dan <i>Internet of Things</i> dengan industri manufaktur modern</p> |

Sumber: U.S. Chamber of Commerce, 2017

Seperti yang telah dipaparkan pada tabel diatas memang terlihat bahwa kebijakan *Internet Plus* merupakan kebijakan yang dipayung besari oleh kebijakan *Made in China 2025*. Kebijakan *Internet Plus* merupakan kebijakan dengan target jangka waktu hanya lima tahun untuk Tiongkok mampu mengintegrasikan internet kedalam industri manufaktur modern, sementara kebijakan *Made in China 2025* merupakan kebijakan pemerintah Tiongkok yang dalam jangka waktu 10 tahun bisa membawa Tiongkok mampu menjadi negara adidaya dibidang teknologi informasi dan komunikasi mengalahkan ekonomi terbesar pertama di dunia yakni Amerika Serikat.

B. IMPLEMENTASI DAN INISIATIF STRATEGI *INTERNET PLUS* TIONGKOK

Memandang lebih dalam pada kebijakan *Internet Plus*, pemerintah Tiongkok mulai mengimplementasikan kebijakan ini resmi pada pertengahan tahun 2015.⁵⁷ Selain di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang, internet dipilih sebagai salah satu strategi oleh pemerintah Tiongkok dikarenakan internet menciptakan lebih banyak ruang, kata perdana menteri Li Kiqiang.⁵⁸

⁵⁷ David Schulze, Nadine Godehardt. China 4.0 Partu and Society Debate the Digital Transformation. 2017. German Institutur for international and Security Affairs

⁵⁸ Li Yang. China Internet Plus. 2015. Telegraph United Kingdom. Diakses pada 09 September 2018, <http://telegraph.co.uk/chinawatch>

Seperti yang diketahui bahwa rencana aksi yang dikeluarkan pada bulan maret 2015 tersebut, pemerintah Tiongkok telah bersumpah untuk menerapkan strategi internet plus serta mempromosikan teknologi berkekuatan tinggi ke dalam 10 industri utama guna penciptaan inovasi manufaktur modern. Kesepuluh sektor industri utama tersebut meliputi: 1) Teknologi informasi; 2) Alat mesin otomatis dan robotik; 3) Peralatan aerospace atau transportasi udara seperti pesawat hingga roket luar angkasa; 4) Peralatan maritime dan pengiriman teknologi berkekuatan tinggi; 5) Peralatan transportasi yakni kereta api modern; 6) Kendaraan dan Peralatan energy modern; 7) Peralatan listrik; 8) Peralatan pertanian; 9) Biopharma; 10) Produk-produk medis.⁵⁹

Pada dasarnya implementasi kebijakan *Internet Plus* ini sendiri adalah untuk meningkatkan secara menyeluruh sektor perindustrian maju Tiongkok. strategi *Internet Plus* terbagi mejadi dua bagian dimana dalam tahun 2020 Tiongkok akan berhasil dalam meningkatkan industri domestic sebanyak 40% dan pada tahun 2025 sebanyak 70% sehingga keseluruhan waktu yang dibutuhkan Tiongkok untuk menjadi negara adidaya dibidang teknologi adalah 15 tahun pasca di implementasikan kebijakan *Internet Plus* pada 2015.⁶⁰

⁵⁹ Scott Kennedy. *Made in China 2025*. 2015. Center for Strategic & International Studies Search

⁶⁰ Ibid

Dalam implemementasi kebijakan *Internet Plus* pemerintah Tiongkok memfokuskan pada beberapa hal yang kemudian dituangkan ke dalam inisiatif kebijakan tersebut. Inisiatif yang tertuang dalam kebijakan *Internet Plus* ini di bangun dari motivasi untuk menghubungkan industri Tiongkok menuju pasar global. Bagian dari motivasi ini karena adanya dorongan yang datang dari pertumbuhan pengguna internet maupun *smart phone* yang ada di Tiongkok. menurut McKinsey, pada tahun 2013 ekonomi digital Tiongkok mewakili sekitar 4,4 % dari Produk Domestik Bruto (PDB), yakni lebih tinggi dari negara Amerika Serikat dan juga Jerman.⁶¹

Inisiatif yang di tuangkan dalam kebijakan *Internet Plus* tersebut meliputi: 1) Pemerintah akan mengucurkan lebih banyak dana untuk penelitian dan juga pengembangan industri Tiongkok, yakni mencapai 2,5 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tahun 2020; 2) Menghentikan ketergantungan terhadap inovasi teknologi non-domestik atau barat; 3) Meningkatkan akses koneksi internet yakni 100 MB/detik untuk masyarakat atau warga negara yang tinggal di perkotaan, dan yang terakhir; 4) Pemerintah juga akan mengucurkan lebih banyak dana untuk mempromosikan pengembangan bisnis dan inovasi industri.⁶²

⁶¹ China Telecom Americas

⁶² ibid

Beberapa Rencana yang tertuang dalam inisiatif kebijakan *Internet Plus*, bertujuan untuk para pelaku bisnis agar tertarik memasuki pasar Tiongkok. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pembuat keputusan bisnis di Tiongkok yakni wakil presiden EMC terkait kebijakan *Internet Plus*. Dalam pidatonya menyampaikan bahwa, negara-negara ekonomi besar akan secara radikal merubah strategi karena program yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok ini.⁶³ Inisiatif yang tertuang dalam kebijakan *Internet Plus* itu sendiri akan diperkirakan terwujud karena adanya peluang yang menjanjikan untuk memodernisasikan sektor pertanian guna meningkatkan standar hidup di daerah pedesaan melalui munculnya internet.

Untuk memodernisasi pertanian, pemerintah Tiongkok mendapat pekerjaan rumah yang begitu besar yakni; Mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang informasi atau berhubungan dengan internet untuk membuat *platform* guna mendukung bentuk baru dari produksi pertanian, seperti pertanian dalam skala besar, koperasi petani, memperkuat aliran pasar terhadap permintaan kosumen, serta menghubungkan semua aspek produksi pertanian untuk terhubung ke internet. Contohnya, mempromosikan hasil produksi pertanian secara cepat dan lintas batas melalui kehadiran internet. Pemerintah Tiongkok

⁶³ ibid

percaya bahwa apabila internet terus dikembangkan akan menjadi kunci utama meningkatkan kemampuan industri manufaktur Tiongkok.

C. PELUANG DAN HAMBATAN BAGI NEGARA MITRA DAGANG TIONGKOK ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INTERNET PLUS*

Pada tahun 2015, pemerintah Tiongkok meluncurkan sebuah strategi besar terkait pembangunan nasional di era digital. Dalam dokumen kebijakan pemerintah Tiongkok, strategi besar tersebut diberi nama *China Manufacturing 2025*.⁶⁴ Saat ini tidak dapat diragukan lagi bahwa investasi terus mengalami pertumbuhan di Tiongkok dan diikuti dengan upaya pengembangan industri domestik untuk terus mengembangkan kualitas dan efisiensi, guna menarik para investor yang ingin berinvestasi di Tiongkok.

Tak hanya membawa angin segar bagi para investor atau perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Tiongkok, sayangnya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok terkait kebijakan pengembangan industri manufaktur banyak mendapat kritikan oleh sejumlah negara-negara mitra dagangnya khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Kritik ini datang dikarenakan komitmen pemerintah Tiongkok dalam perjanjian kerjasama antar negara G-20 bahwa Tiongkok telah sepakat dan berkomitmen untuk

⁶⁴ European Union Chamber of Commerce in China. *China Manufacturing 2025*. 2017. European Union Report. Diakses pada 09 September 2018. www.europeanchamber.com.cn

terbuka demi keuntungan bersama dalam rangka pembangunan ekonomi digital, ternyata berbanding terbalik dengan diimplementasikannya kebijakan terkait pembangunan industri manufaktur Tiongkok 2025.

Berbanding terbalik dengan komitmen Tiongkok, seperti yang telah disampaikan oleh presiden Xi Jinping dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (*Economic World Forum*) yakni; dibawah kebijakan pengembangan kemajuan manufaktur, Tiongkok akan memastikan perusahaan-perusahaan asing akan mendapatkan perlakuan yang sama dibawah kebijakan strategis, guna meningkatkan investor asing untuk berinvestasi di Tiongkok.⁶⁵

Sayangnya, kebijakan manufakturing Tiongkok justru menunjukkan kecondongannya dalam pengembangan perusahaan domestik semata, dan banyak menunjukkan ketidakuntungan bagi perusahaan asing. Hal tersebut cukup membuat ketengangan antara Tiongkok dan negara mitra perdagangan internasional Tiongkok. Sehingga hal ini membuat Tiongkok mendapat banyak tekanan dari berbagai negara mitra dagangnya untuk mereformasi ulang kebijakan manufaktur untuk membangun lingkungan yang adil dan transparan bagi pelaku ekonomi bisnis domestik dan asing.

Terdapat beberapa peluang dan hambatan atas implementasi kebijakan *China Manufacturing 2025* ini bagi para pelaku bisnis asing atau *Multi National Corporation*. Bagi para pelaku bisnis domestik langkah

⁶⁵ Ibid

Tiongkok untuk mengimplementasikan kebijakan dibawah *China Manufacturing 2025*. Dari perspektif kepentingan nasional Tiongkok, rencana ini jauh lebih baik dan sangat tepat melihat dari keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Tiongkok, dimana sebagai negara dengan jumlah pengguna internet di dunia, Tiongkok memiliki peluang besar untuk terus maju di bidang manufaktur modern. Perusahaan-perusahaan domestik diperkirakan akan lebih kompetitif dalam persaingan pasar internasional, sehingga perusahaan domestik akan mengibarkan sayapnya di dunia internasional untuk melakukan investasi di luar negeri.⁶⁶

Namun, bagi perusahaan asing, strategi dibawah rangkaian *China Manufacturing 2025* dalam regulasi yang dalam kebijakan tampak merugikan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kebijakan ini akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok serta kepentingan Tiongkok itu sendiri, dimana Tiongkok akan berfokus pada pertumbuhan perusahaan-perusahaan domestik agar siap dalam pasar internasional, serta meningkatkan keseluruhan produk-produk dalam negeri. Hal tersebut bertujuan agar Tiongkok dapat terlepas dari ketergantungan mereka oleh produk-produk luar negeri dan menghentikan seluruh inovasi yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan asing.

⁶⁶ Scott Kennedy. *Made in China 2025*. 2015. Center for Strategic & International Studies Search

Sehingga hal itu akan membuat perusahaan-perusahaan asing akan kehilangan peluang di pasar Tiongkok itu sendiri seiring berjalannya waktu. Dalam jangka pendek, perusahaan multinasional bisa mendapatkan keuntungan akan dimplementasikannya kebijakan terkait manufaktur Tiongkok itu sendiri melalui beberapa langkah yakni;

Pertama, akan ada investasi yang lebih besar dari Tiongkok untuk perusahaan multinasional atau perusahaan asing. Seperti yang diketahui bahwa saat ini Tiongkok berfokus pada sepuluh industri manufaktur, dalam dalam pengembangannya Tiongkok belum sepenuhnya bisa menyediakan komponen-komponen penting guna mendukung pengembangan kesepuluh industri tersebut. Sehingga Tiongkok membutuhkan komponen-komponen itu dari perusahaan asing yang sudah lebih dulu memiliki kemampuan teknologi mutakhir seperti Amerika Serikat dan Jerman.

Kedua, saat ini dalam pengembangan kebijakan terkait *China Manufacturing 2025* Tiongkok begitu merangkul perusahaan asing yang memiliki teknologi cerdas untuk bekerjasama dengan Tiongkok. saat ini terdapat dua negara yang Tiongkok belum dapat terlepas sepenuhnya dari kemajuan teknologi yang negara tersebut bawa yakni, Amerika Serikat dan juga Jerman. Sehingga Tiongkok menyebut hal tersebut sebagai *Zero-Sum* dari hubungan bisnis.

Ketiga, keuntungan secara luas akan keberhasilan kebijakan ini adalah saat Tiongkok berhasil meningkatkan kapasitas manufakturnya, maka

diikuti dengan meningkatnya tata kelola ekonomi secara keseluruhan, termasuk sistem keuangan dan fiskal, memperkuat sistem pendidikan, dan meningkatkan akses ke berbagai sumber informasi.⁶⁷

D. KERUGIAN BAGI AMERIKA SERIKAT ATAS KEBIJAKAN *INTERNET PLUS* DI BAWAH PAYUNG BESAR *CHINA MANUFACTURING 2025*

Banyak analisis perdagangan berpendapat bahwa Tiongkok dapat membuktikan dirinya menjadi pasar yang jauh lebih signifikan untuk ekspor Amerika Serikat di masa yang akan datang. Tiongkok adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat harus di proyeksikan untuk tahun-tahun yang akan datang, asalkan Tiongkok benar-benar menerapkan reformasi ekonomi yang baru yang komprehensif.

Tujuan Tiongkok dalam memodernisasi infrastrukturnya, menyeimbangkan kembali ekonomi, meningkatkan industri manufaktur, meningkatkan sektor jasa dan meningkatkan keamanan jejaring sosial salah satunya dengan strategi *Internet Plus* malah justru mendapat banyak kritik dari negara barat. Rancangan kebijakan tersebut memang secara substansial telah meningkatkan daya beli warga negara Tiongkok atau domestik secara signifikan terutama bagi warga negara Tiongkok yang tinggal di perkotaan.

⁶⁷ Ibid

Namun, disisi lain kebijakan tersebut juga mendapat banyak kritik dari barat yang disebabkan adanya beberapa regulasi yang menyebabkan Tiongkok melakukan persaingan dagang yang tidak adil bagi negara mitra dagangnya khususnya Amerika Serikat.

Terdapat beberapa hal yang membuat kerugian bagi Amerika Serikat atas diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* oleh Tiongkok sesuai yang tercantum dalam *congress* Amerika Serikat setelah Tim 301 dari USTR, yakni:⁶⁸

- 1) Dalam kebijakan *Internet Plus* pemerintah Tiongkok menunjukkan kurangnya kebebasan dalam berinternet, yang mengarahkan pemerintah untuk melakukan penyensoran internet secara ketat guna mengurangi ketergantungan inovasi teknologi non-domestik. Hal tersebut pemerintah Tiongkok implementasikan dengan banyaknya media sosial dari barat yang di blokir atau dilarang penggunaannya di Tiongkok, sehingga membuat banyak pengusaha dari Amerika Serikat di bidang teknologi yang terpaksa gulung tikar akibat hal tersebut salah satunya adalah *google*.
- 2) Dalam jangka yang pendek Amerika Serikat akan sedikit diuntungkan atas adanya kebijakan *Internet Plus*, hal tersebut dikarenakan dalam langkah pemerintah Tiongkok untuk

⁶⁸ Wayne M. Morrison. China-US Trade Issue. 2018. Congressional Research Service

memodernisasi industri manufaktur, Tiongkok belum sepenuhnya mampu memproduksi peralatan atau suku cadang canggih untuk memodernisasi beberapa prioritas yang ada dalam *Internet Plus*. Tiongkok masih sepenuhnya bergantung pada produk-produk canggih Amerika Serikat seperti *micro chip*, sehingga Amerika Serikat diuntungkan atas adanya hal tersebut.

Namun disisi lain jangka panjang yang ditimbulkan atas adanya kebijakan *Internet Plus* ini untuk Amerika Serikat adalah saat Tiongkok sudah mampu memproduksi peralatan canggih itu sendiri karena telah banyak belajar dari produk-produk canggih Amerika Serikat yang telah di ekspor dari Amerika Serikat, maka Tiongkok tidak akan membutuhkan lagi pada produk Amerika Serikat. Sehingga kebijakan *Internet Plus* merupakan kebijakan yang tumpang tindih untuk kepentingan Tiongkok sendiri.

Seperti yang banyak diketahui bahwa investasi memainkan peran yang begitu signifikan dalam perkembangan hubungan komersial Amerika Serikat-Tiongkok. Investasi Amerika Serikat di Tiongkok sebagian besar dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Pada awal saat Tiongkok mulai membuka dan meliberalisasikan ekonominya yakni tahun 1979, aliran FDI Amerika Serikat di Tiongkok mengalami pertumbuhan yang amat pesat. Namun, baru-baru ini semenjak Tiongkok mulai menerapkan beberapa kebijakan manufaktur, banyak pengusaha asal Amerika Serikat

yang beroperasi di Tiongkok mulai mengeluhkan dan mengkhawatirkan akan pembatasan dan persyaratan investasi di Tiongkok yang sering menghambat mereka.⁶⁹

Dengan adanya pembatasan FDI Amerika Serikat di Tiongkok, para pejabat perdagangan Amerika Serikat telah mendesak Tiongkok untuk meliberalisasikan rezimnya untuk kembali meningkatkan peluang bisnis Amerika Serikat dan memperluas ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok. Meskipun Tiongkok merupakan negara penerima FDI terbesar di dunia, namun pemerintah pusat Tiongkok memberlakukan banyak pembatasan pada jenis FDI yang diizinkan di Tiongkok. Menurut *US-China Business Council* (USBC), Tiongkok memberlakukan banyak hambatan kepemilikan pada hampir 100 industri asing.

Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh *European Union Chamber of Commerce* yang ada di Tiongkok. Dalam surveinya Eropa menyatakan bahwa lingkungan bisnis asing di Tiongkok menjadi semakin “bermusuhan” dengan perusahaan domestik, serta perusahaan merasa diperlakukan kurang baik oleh pemerintah Tiongkok yang lebih berpihak pada perusahaan domestik. Survei yang dilakukan oleh *European Union Chamber of Commerce* yang ada di Tiongkok menghasilkan temuan bahwa sebanyak 57% responden yang notabene adalah pengusaha asing

⁶⁹ Ibid.,

BAB III
HUBUNGAN KERJASAMA DAGANG AMERIKA SERIKAT
DENGAN TIONGKOK SEBELUM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN *INTERNET PLUS*

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling besar di dunia. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan sepertiga dari nilai total ekonomi dunia. Bukan hanya menjadi negara perdagangan terbesar, dua negara ini juga menjadi tujuan utama bagi investor asing. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara eksportir terbesar di dunia yang juga memiliki surplus perdagangan terbesar di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara importir terbesar di dunia, dengan memiliki defisit perdagangan terbesar.⁷⁰ Reformasi ekonomi dan perdagangan yang dimulai pada tahun 1979 telah membantu mengubah Tiongkok menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan tercepat di dunia.

Hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok telah meluas secara substansial sejak Tiongkok mulai mereformasi sistem ekonominya dan meliberalisasikan rezim perdagangannya pada akhir tahun 1970-an. Total perdagangan barang dagangan Amerika Serikat-Tiongkok meningkat dari \$ 2

⁷⁰ Cai Songfeng, Zhang Yaxiong, dkk. The Effect of China-US Trade Agreement (CHUSFTA). State Information Center

miliar pada tahun 1979 menjadi \$ 636 miliar pada tahun 2017. Tiongkok saat ini adalah mitra dagang barang terbesar Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar ketiga dan sumber impor terbesar.⁷¹ Banyak para konsumen Amerika Serikat yang merasa diuntungkan akan barang murah yang diimpor dari Tiongkok ke Amerika Serikat. Tiongkok juga merupakan pemegang saham asing terbesar untuk Amerika Serikat.

Volume perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tumbuh dengan begitu cepat, sehingga hal ini membuat hubungan perdagangan kedua negara terjalin begitu baik. Amerika Serikat menjadi mitra dagang terbesar sekaligus sebagai investor terbesar Tiongkok. Sedangkan Tiongkok juga menjadi mitra dagang terbesar kedua serta importir terbesar untuk Amerika Serikat. Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah berkembang mejadi salah satu hubungan perdagangan bilateral tercepat dan terbesar di dunia. Tiongkok yang saat ini adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat diantara negara-negara berkembang lainnya dan Amerika Serikat yang merupakan negara adikuasa, kedua negara ini memainkan perang yang begitu penting dalam membangun zona perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral global.⁷²

Memiliki peran penting dalam tata kelola global khususnya dalam bidang ekonomi, hal ini menjadikan setiap kebijakan terkait perekonomian

⁷¹ Wayne M. Morrison. China-US Trade Issue. 2018. Congressional Research Service.

⁷² Ibid

yang di ambil oleh kedua negara akan memiliki dampak yang signifikan bagi satu sama lainnya. Baru-baru ini yang sedang terjadi, globalisasi datang membawa banyak perubahan bagi tatanan dunia, hal ini dirasakan oleh Tiongkok, dimana Tiongkok merupakan negara dengan jumlah pengguna internet paling banyak di dunia. Hal tersebut membuat pemerintah Tiongkok berambisi membawa Tiongkok menjadi negara dengan industri manufaktur paling maju di dunia.

Melalui rancangan *Five Years Plan* ke-13 Tiongkok yang di dalamnya kebijakan *Made in China 2025* serta *Internet Plus* menjadi strategi kunci penggerak pertumbuhan ekonomi di era digital. Kebijakan *Internet Plus* diumumkan secara resmi oleh perdana menteri Li Keqiang dalam Kongres Rakyat Nasional pada bulan Maret 2015. Kebijakan *Internet Plus* sendiri merupakan strategi yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok guna mengintegrasikan internet, komputasi awan, data besar, dan *Internet of Things* (IoT) dengan fokusnya pada industri manufaktur modern yang akan mendorong pertumbuhan serta pengembangan *E-Commerce*, *Internet Banking*, industri tradisional, serta perusahaan-perusahaan kosmetik dalam meningkatkan kehadiran mereka di persaingan global. Target untuk tercapainya tujuan Tiongkok melalui strategi *Internet Plus* itu sendiri adalah dalam jangka waktu lima tahun yakni mulai terhitung pada tahun 2016-2020.

Tujuan besar yang ada dalam rancangan *Five Years Plan* ke-13 Tiongkok ini adalah, Tiongkok ingin mengurangi ketergantungan serta

sepenuhnya terlepas dari inovasi teknologi non-domestik. Rancangan yang ada dalam *Five Years Plan* ke-13 Tiongkok khususnya dalam kebijakan *Made in China 2025* dan *Internet Plus* banyak menuai kritik dari negara-negara barat yakni Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Kritik tersebut datang dikarenakan regulasi-regulasi yang tertuang dalam kebijakan *Internet Plus* yang banyak merugikan negara mitra dagang Tiongkok khususnya Amerika Serikat. Serangkaian regulasi yang tertuang dalam inisiatif kebijakan rencana lima tahun pemerintah Tiongkok ini dianggap sebagai pelanggaran dalam perjanjian perdagangan atau dapat dikatakan bahwa Tiongkok membuat praktek perdagangan yang tidak adil bagi negara mitra dagangnya.

Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagang Tiongkok lainnya percaya bahwa inisiatif yang tertuang dalam rancangan *Five Years Plan* ke-13 milik Tiongkok itu secara inheren mendiskriminasikan Amerika Serikat sebagai negara mitra dagangnya serta bagi perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk mentransfer teknologi mereka demi kesuksesan rencana Tiongkok dalam menjadi negara dengan manufaktur canggih.⁷³ Hal tersebut memunculkan pertanyaan akan keberlanjutan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun sebelum dibahas lebih jauh akan keberlanjutan hubungan kedua negara setelah Tiongkok mengimplementasikan kebijakan *Internet Plus* pada bab III kali akan dibahas terlebih dahulu

⁷³ Scott Kennedy and Christopher K. Johnson, "Perfecting China, Inc.," *Center for Strategic and International Studies*, May 2016, 27–28.

bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* oleh Tiongkok.

A. UPAYA YANG DILAKUKAN AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK DALAM MENYEIMBANGKAN HUBUNGAN PERDAGANGAN

Menjadi dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok cukup banyak menandatangani perjanjian perdagangan, salah satunya ada dalam keanggotaannya di *World Trade Organization* dan juga *G-20*. Hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga merupakan hubungan bilateral antara negara maju dan negara berkembang terbesar di dunia. Seperti yang di ketahui bahwa, Tiongkok dan juga Amerika Serikat memiliki kondisi nasional yang begitu berbeda, salah satunya adalah pembangunan pasar ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi mereka sendiri-sendiri. Faktor-faktor seperti kondisi nasional atau keunggulan kompetitif membuat kedua negara saling bergantung satu sama lain sehingga muncul keterbukaan untuk mengembangkan jalan kedua negara di era globalisasi.

Aturan yang tertuang dalam *World Trade Organization* banyak memberikan perlindungan kelembagaan yang kuat dan juga stabil demi perkembangan hubungan perdagangan antar kedua negara dalam kerangka WTO. Komitmen yang Tiongkok dan Amerika Serikat sepakati dalam *G-20*, WTO, dan APEC harus kedua negara ini jaga dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Hubungan kerjasama antar kedua negara juga di dasari adanya globalisasi ekonomi saat ini. Ketergantungan antara Tiongkok dan Amerika

Serikat membuat kedua negara harus saling melengkapi untuk menyediakan kekuatan pendorong yang kuat agar kerjasama antar kedua negara saling menguntungkan atau *win-win*. Kedua negara antara Tiongkok dan Amerika Serikat memperoleh keuntungan dari hubungan perdagangan dan kerjasama ekonomi yang mereka jalani. Seperti yang tercatat dalam laporan kerja pemerintah Tiongkok, Tiongkok merupakan tujuan utama eksportir penting bagi Amerika Serikat. Barang seperti kacang kedelai, kain katun, pesawat terbang, mobil, dan juga sirkuit.

Di tahun 2016 Amerika Serikat memiliki surplus perdagangan dalam produk pertanian sebesar US\$ 16,4 milyar. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok mengimpor sebesar US\$ 13,8 milyar dari kacang kedelai, US\$ 12,6 milyar dari pesawat terbang, US\$ 12,1 miliar dari mobil, dan sebesar US\$ 8,8 milyar dari sirkuit. Selama 10 tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok telah hampir tiga kali laju pertumbuhan ekspor Amerika Serikat dan dua kali laju pertumbuhan Tiongkok ke Amerika Serikat. Pada tahun 2015 total pendapatan penjualan mencapai US\$ 517, dan laba usaha mencapai US\$ 36.2 milyar. Invesatasi perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat juga berkembang pesat. Proyek-proyek invesatasi Tiongkok juga menciptakan lebih dari 140.000 lapangan kerja bagi Amerika Serikat. Menurut *US-China Business Council* (USCBC), pada tahun 2015, ekspor Amerika Serikat ke

Tiongkok atau investasi dua arah menyumbangkan US\$ 216 milyar ke GDP Amerika Serikat, dan 2,6 juta lapangan kerja di Amerika Serikat.⁷⁴

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan antar kedua negara. Baik Amerika Serikat maupun Tiongkok sering mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan serta investasi yang diadakan oleh kedua negara. Pada bulan Februari tahun 2012, enam delegasi dari Tiongkok dan lebih dari 500 pengusaha Tiongkok berkunjung ke Amerika Serikat. Delegasi ini mengunjungi delapan negara-negara Amerika Serikat dengan menandatangani perjanjian perdagangan dan investasi serta kerjasama di semua sektor, yakni sebesar US\$ 38,6 milyar. Pada bulan September 2015, di bawah kerangka kerjasama perdagangan dan investasi, Tiongkok menggelar empat kegiatan promosi perdagangan dan investasi di Washington, California, dan Texas. Lebih dari 300 pengusaha berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan dan investasi di semua sektor sebesar US\$ 5,3 milyar.⁷⁵

Pada tahun 2015, defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan Tiongkok meningkat 6,5% dari tahun sebelumnya menjadi \$ 367,2 milyar. Sementara itu untuk ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok turun menjadi 6,4%

⁷⁴ Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Research Report on China-US Economic and Trade Relations. Mei 2017. Hal 6-8

⁷⁵ Ibid

sebelum kedua negara merancang strategi untuk memulihkan keadaan di tahun-tahun berikutnya.

B. TREN INVESTASI ASING AMERIKA SERIKAT DI TIONGKOK SEBELUM ADANYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INTERNET PLUS*

Perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok meningkat pesat setelah kedua negara membangun kembali hubungan diplomatik pada Januari 1979. Kemudian kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bilateral pada bulan juli 1979. Hal tersebut membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Amerika Serikat.⁷⁸

Pertumbuhan investasi langsung Amerika Serikat di Tiongkok telah stagnan selama lima tahun terakhir, bahkan saat investasi asing Amerika Serikat meningkat dan meluas di negara-negara lainnya.⁷⁹ menurut Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat, pada tahun 2015, investasi asing Amerika Serikat di Tiongkok naik tipis hingga \$ 7,1 milyar, sehingga saham Amerika Serikat naik 2 persen dari total investasi asing Amerika Serikat di tahun 2014.⁸⁰

Dari tahun 2008 hingga 2015 yakni sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus*, data dari Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat menunjukkan peningkatan stabil dalam stok *Foreign Direct Investment* (FDI)

⁷⁸ Wayne M. Morrison. China-US Trade Issue. 2018. Congressional Research Service.

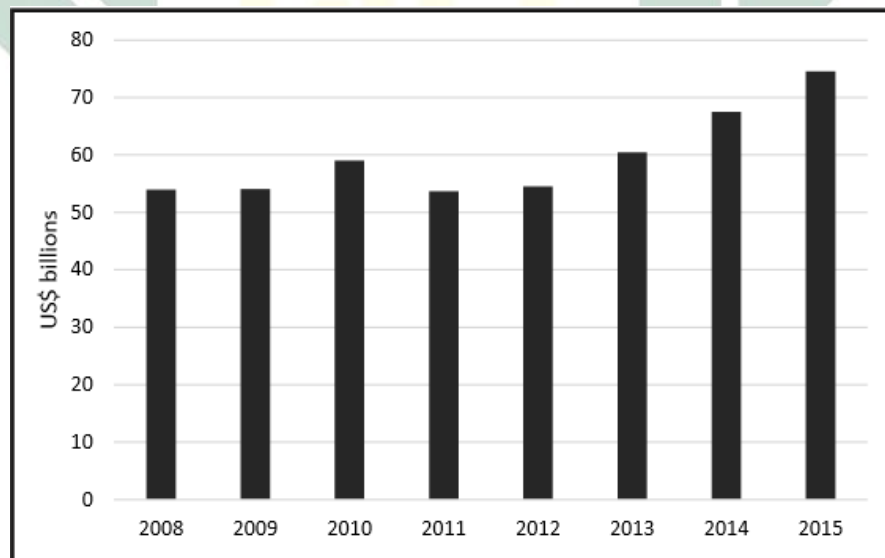
⁷⁹ David Dollar, "United States-China Two-Way Direct Investment: Opportunities and Challenges," *Brookings Institution*, January 2015, 11.

⁸⁰ U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *U.S. International Trade in Goods and Services – China*.

Amerika Serikat secara kumulatif di Tiongkok dari \$ 53,9 miliar menjadi \$ 74,6 miliar, akan disajikan pada gambar dibawah.⁸¹ Sementara itu investasi asing Amerika Serikat di Tiongkok masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi asing Tiongkok di Amerika Serikat tercatat dari tahun 2008 hingga 2015 saham Tiongkok di Amerika Serikat naik sekitar \$ 1,1 milyar menjadi \$ 14,8 milyar. Aliran saham ini Tiongkok di Amerika Serikat telah tumbuh lebih cepat dari aliran saham Amerika Serikat di Tiongkok.⁸²

Grafik 3.2:

Investasi Asing Amerika Serikat Di Tiongkok (2008-2015)



Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.

Arus investasi asing ke Tiongkok sedikit mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya biaya serta iklim investasi asing

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

dari persaingan dengan negara-negara dari Asia Tenggara.⁸³ Hal tersebut membuat Tiongkok berniat untuk lebih meliberalisasi rezim investasi asingnya di beberapa dokumen tingkat tinggi, termasuk dalam rancangan yang ada dalam *Five Years Plan* Ke-13 Tiongkok. Kebijakan ini mengarahkan Tiongkok untuk memperluas akses investasi asing di Tiongkok dengan mengatus akses pasar, mengatur zona perdagangan bebas. Namun, sayangnya hal tersebut tidak berbanding lurus, perusahaan-perusahaan asing justru lebih banyak mengeluh serta mengkritik ada kebijakan tersebut, Tiongkok justru menunjukkan kurangnya kemajuan dalam liberalisasi perdagangan yang telah dijanjikan oleh Tiongkok itu sendiri.⁸⁴

Sementara itu sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* oleh pemerintah Tiongkok, Tiongkok dan Amerika Serikat banyak meningkatkan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015 kebelakang Amerika Serikat telah mendongkrak investasi untuk pembangunan jembatan, kereta bawah tanah, rel kereta, dam, bandara, serta infrastruktur lainnya di Tiongkok. hal ini dikarenakan para pengamat ekonomi asal Amerika Serikat percaya bahwa ketika Amerika Serikat tidak meningkatkan jumlah investasi untuk infrastruktur di Tiongkok maka Amerika Serikat akan

⁸³ Chinese officials, meeting with Commission, Beijing, China, June 24, 2016; Deutsche Welle, "China Sees Foreign Direct Investment Slowdown," June 18, 2016

⁸⁴ American Chamber of Commerce in the People's Republic of China, "2016 China Business Climate Survey Report," 2016. Hal 06

kehilangan sekitar US\$ 1 triliun untuk pendapatan tahunan dan sekitar 3,5 juta lapangan kerja akan hilang.⁸⁵

Dari data yang telah dipaparkan diatas, tampak bahwa hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tumbuh dengan saling melengkapi kekuatan masing-masing sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* atau rancangan keseluruhan kebijakan yang ada dalam rencana lima tahun pemerintah Tiongkok ke-13. Tiongkok dan Amerika Serikat telah memanfaatkan kesempatan dari adanya globalisasi ekonomi dan kedua negara memainkan peran penting dalam tata kelola global.

Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai anggota penting dari WTO bersama-sama anggota lain telah menunjukkan diri mereka dengan mempromosikan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama yang ada dalam WTO sebelum diimplementasikannya kebijakan *Internt Plus*. Sebelum diimplementasikannya kebijakan tersebut baik Amerika Serikat dan Tiongkok meningkatkan koordinasi kebijakan mereka dibawah kerangka G-20, serta membuat usaha bersama untuk mendorong pertumbuhan perdagangan serta ekonomi global.

⁸⁵ Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Research Report on China-US Economic and Trade Relations. Mei 2017. Hal 102

BAB IV

**FLUKTUASI PERDAGANGAN ANTARA AS-TIONGKOK SETELAH
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *INTERNET PLUS*: KEBIJAKAN
BALASAN HINGGA PERANG DAGANG**

Setelah peneliti menggambarkan tentang kebijakan *Internet Plus* Tiongkok pada bab II, serta hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pra diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* oleh pemerintah Tiongkok pada bab III. Selanjutnya, pada bab IV ini, peneliti akan menggambarkan melalui data temuan yang berupa dokumen resmi, jurnal maupun *paper, statement* dari *official web government*, media cetak online serta pidato resmi dari masing-masing pemangku kebijakan baik Tiongkok maupun Amerika Serikat terkait: Bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan *Internet Plus* Tiongkok terhadap hubungan kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang akan peneliti bagi kedalam beberapa sub bab.

Seperti yang tampak, reformasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh begitu cepat di Tiongkok yang diikuti bersamaan dengan efek yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi telah menyebabkan hubungan perekonomian antara Tiongkok dengan Amerika Serikat menjadi semakin terintegrasi. Meskipun pertumbuhan hubungan ekonomi Tiongkok dengan Amerika Serikat dianggap oleh sebagian besar analisis ekonom merupakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan secara keseluruhan, hal yang terjadi malah justru

sebaliknya. *Congressional Research Service of United States* menyatakan bahwa hubungan antar kedua negara yakni Tiongkok dan Amerika Serikat justru mengalami ketegangan yang diakibatkan atas sejumlah kebijakan ekonomi terkait inovasi industri manufaktur dan perdagangan Tiongkok yang dikeluarkan baru-baru ini.⁸⁶

Kebijakan terkait industri ekonomi yang bergerak untuk memodernisasi industri manufaktur yang dikeluarkan oleh Tiongkok antara lain *Made in China 2025* dan juga *Internet Plus* banyak dikritik oleh para kritikus Amerika Serikat terkait dengan proteksionisme, distorsi ekonomi yang pada akhirnya akan merusak kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Tiongkok. Dari perspektif Amerika Serikat, beberapa inisiatif yang tertuang dalam kebijakan *Made in China 2025* maupun *Internet Plus* sangat dikhawatirkan oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Amerika Serikat atas sejumlah kebijakan yang diarahkan oleh Tiongkok yang tampaknya mendistorsi perdagangan dan arus investasi Amerika Serikat di Tiongkok.

Bidang-bidang utama yang paling dikhawatirkan oleh pihak Amerika Serikat adalah kebijakan inovasi teknologi yang diskriminatif. Banyak pembuat kebijakan Amerika Serikat yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat serta hilangnya beberapa pekerjaan di beberapa sektor. Seperti yang telah dijelaskan

⁸⁶ Wayne M. Morrison. *China-US Trade Issue (2018)*. Congressional Research Service. Tersedia dalam www.crs.gov diakses pada 12 November 2018

pada bab sebelumnya bahwa kebijakan *Internet Plus* maupun *Made in China 2025* merupakan serangkaian kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memodernisasi industri manufaktur Tiongkok menjadi lebih maju serta mewujudkan cita-cita Tiongkok untuk menghentikan segala ketergantungan terhadap inovasi teknologi non-domestik. Sehingga fokus Tiongkok hanya pada pengembangan industri dalam negeri dan mengabaikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berada di Tiongkok. Karena hal tersebut Tiongkok banyak dikritik akibat adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaku bisnis asing di Tiongkok.

Sehingga dari adanya hal tersebut departemen perdagangan Amerika Serikat atau USTR menyatakan bahwa sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang menjadikan hubungan kerjasama dagang antar keduanya menjadi tegang di dasari karena meningkatnya intervensi pemerintah Tiongkok di berbagai sektor melalui kebijakan industri ekonomi beberapa tahun terakhir.⁸⁷ Adanya pengaruh yang ditimbulkan pasca diimplementasikannya kebijakan industri ekonomi untuk meningkatkan inovasi industri manufaktur yakni melalui kebijakan *Internet Plus* dan juga *Made in China 2025* akan peneliti bagi kedalam beberapa sub bab dibawah ini:

⁸⁷ Ibid.,

A. PERTEMUAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN PRESIDEN XI JINPING YANG MEMBAHAS KEBIJAKAN *INTERNET PLUS* PADA AKHIR TAHUN 2016

Pada tahun 2016 pasca diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* dan *Made in China 2025* terjadi pertemuan antara presiden Xi Jinping dan presiden Obama pada bulan September 2016. *US Chamber of Commerce* pertemuan ini terjadi atas dasar tekanan yang terus meningkat pada perusahaan asing untuk berbagi teknologi sebagai pertukaran akses pasar di Tiongkok yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan asing mengalami kerugian karena beberapa kebijakan inovasi industri ekonomi yang berfokus pada inovasi manufaktur modern yang dikeluarkan oleh Tiongkok.

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, rencana ke 13 Tiongkok untuk lima tahun kedepan melalui kebijakan *Internet Plus* untuk meningkatkan inovasi dan mempromosikan pengembangan industri manufaktur serta dengan tujuan untuk menghentikan ketergantungan Tiongkok atas inovasi teknologi non domestik telah dirasakan pengaruhnya oleh para pekerja maupun perusahaan Amerika Serikat yang ada di Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ada di Tiongkok telah menyatakan keprihatinanya atas tekanan yang mereka hadapi dari entitas pemerintah Tiongkok untuk berbagi teknologi dengan mitra di Tiongkok. Sebagai contoh perusahaan yang sangat kompetitif dalam

mengembangkan *Apple* dan *iPod* meluluhkan tingkat pembajakan di Tiongkok menjadi semakin tinggi yang membawa kerugian ekonomi secara signifikan.

Menurut spesialis dalam hak kekayaan intelektual dari Tufts University, “Perusahaan-perusahaan Tiongkok, begitu mereka mendapatkan atau memperoleh teknologi yang dibutuhkan dari Barat yakni Amerika Serikat, maka mereka akan meninggalkan mitra dagang Barat dengan dalih bahwa teknologi atau produk yang gagal memenuhi persyaratan atau peraturan pemerintah Tiongkok. Hal ini adalah contoh lain dari kebijakan industri manufaktur Tiongkok yang ditujukan untuk mendapatkan teknologi dengan segala cara agar industri domestik Tiongkok mampu mencapai keunggulan kompetitif dengan inovasi teknologi non-domestik.”⁸⁸

United State Trade Representative pada tanggal 03 April 2018 memberikan *statement* bahwa Amerika Serikat mendapatkan kerugian ekonomi dari kebijakan yang dirasa tidak adil untuk Amerika Serikat oleh Tiongkok yakni sebesar \$50 miliar.⁸⁹ Laporan USTR terkait hambatan perdagangan luar negeri menyatakan bahwa selama dekade terakhir, pembatasan akses internet Tiongkok telah menimbulkan pengaruh yang

⁸⁸ “Data Theft Case May Test U.S. China Ties,” *Boston Globe*, 13 November 2018.

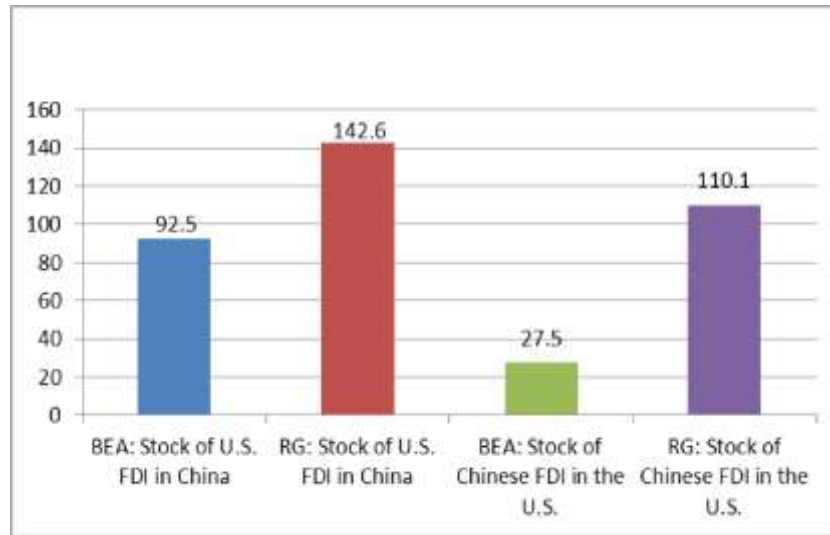
⁸⁹ USTR, pers realease, 3 April 2018, tersedia di <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/under-section-301-action-ustr>.

begitu besar pada pemasok asing atau perusahaan asing yang mengandalkan bisnisnya melalui *online*. Tercatat sebanyak 8 dari 25 situs non-domestik yang paling banyak dikunjungi secara global seperti *yahoo*, *Facebook*, *eBay*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Amazon* dan *Google* telah di blokir atau dilarang penggunaannya di Tiongkok. sehingga, *Freedom House* pada laporan Net merilis bahwa Tiongkok mmenjadi negara yang paling ketat sistem informasinya dibandingkan dengan 65 negara yang telah di survey.⁹⁰

Sehingga setelah pertemuan kedua kepala negara antara presiden Obama dan Presiden Xi Jinping, *White House* mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah berkomitment untuk tidak melakukan praktik dagang yang tidak adil melalui serangkaian kebijakan yang mengharuskan untk mentransfer hak kekayaan intelektual atau teknologi sebagai pertukaran akses pasar di kedua negara seperti kebijakan *internet plus*.⁹¹ Sehingga pada tahun 2016 pasca presiden Obama bertemu dengan Xi aliran FDI Amerika Serikat melangami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan ditunjukkan melalui grafik.

⁹⁰ Freedom House, *Freedom on the Net 2015*, diakses pada 12 November 2018, tersedia di https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FOTN_2015Report.pdf.

⁹¹ The White House, *Fact Sheet: US-China Economic Relations*, diakses pada 13 November 2018, available at <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/04/fact-sheet-us-china-economic-relations>.

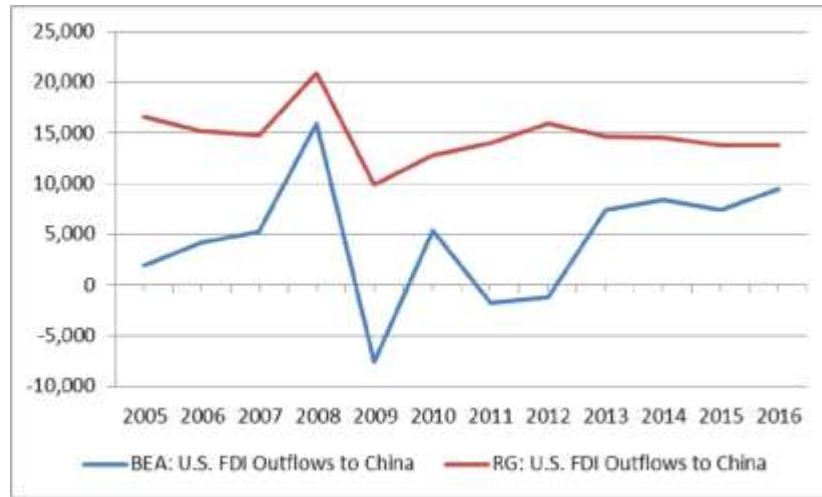


Sumber: Bureau of Economic Analysis and the Rhodium Group, 2016

Grafik 4.1:

Stok FDI AS-Tiongkok 2016

Dari data yang telah dipaparkan diatas terlihat adanya peningkatan stok FDI Amerika Serikat yang ada di Amerika Serikat pasca pertemuan antara presiden Xi Jinping dan presiden Obama melalui beberapa kesepakatan. Grafik berikutnya akan menunjukkan aliran arus FDI tahunan Amerika Serikat ke Tiongkok berikut ini:



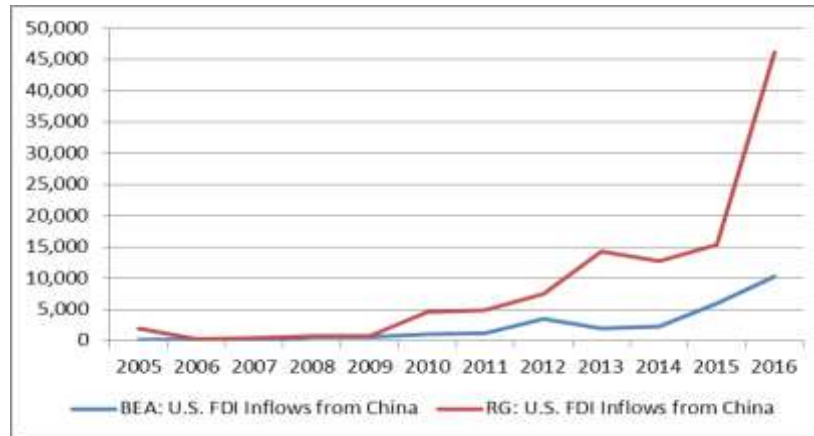
Sumber: Bureau of Economic Analysis and the Rhodium Group (2016)

Grafik 4.2:

Aliran Arus FDI AS Tahunan Ke Tiongkok 2005-2016

Dari grafik yang disajikan diatas tampak FDI tahunan Amerika Serikat Tiongkok mengalami kenaikan dari tahun 2015 ke 2016 pasca pertemuan antara presiden Xi dan presiden Obama.

Setelah dipaparkan data berupa grafik FDI Amerika Serikat ke Tiongkok dari tahun 2005 hingga tahun 2016 yakni pra dan pasca diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* dan sebelum terjadinya pertemuan antar dua pimpinan negara yang terlibat, maka dibawah ini akan disajikan pula grafik FDI Tiongkok yang mengalir di Amerika Serikat untuk mengetahui bagaimana FDI Tiongkok yang ada di Amerika Serikat:



Sumber: Bureau of Economic Analysis and the Rhodium Group (2016)

Grafik 4.3:

FDI Tiongkok di Amerika Serikat 2005-2016

Dari grafik yang disajikan diatas *American Enterprise Institute* (AEI) dan *Heritage Foundation* bersama-sama mempertahankan database *Global Investment Tracker Global*, yang mencantumkan investasi global China sebesar \$ 100 juta atau naik sejak 2005. Berbeda dengan FDI Amerika Serikat di Tiongkok yang naik turun dari tahun ke tahun, FDI Tiongkok di Amerika Serikat justru yang terjadi adalah sebaliknya yakni FDI Tiongkok di Amerika Serikat terus mengalami kenaikan dari tahun 2005 hingga tahun 2016. Kenaikan yang terjadi pada FDI Tiongkok di Amerika Serikat dari tahun ke tahun terus

mengalami kelojakan yang begitu signifikan pasca beberapa kebijakan di terapkan oleh Tiongkok.⁹²

B. DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN TARIF IMPOR OLEH AMERIKA SERIKAT KEPADA TIONGKOK PADA TAHUN 2018

Dari beberapa data pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka Tiongkok akan terus di dorong oleh strategi kebijakan-kebijakan yang begitu ambisius untuk melampaui kekuatan Barat. Meningkatnya hubungan timbal balik antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan terus membuat kedua negara tidak bisa dilepaskan pengaruhnya satu sama lainnya.

Banyak kebijakan industri yang telah diterapkan atau dirumuskan Tiongkok sejak tahun 2006 yang sebagian besar berasal dari dokumen komprehensif yang diterbitkan oleh pihak otoritas tertinggi Tiongkok. Rencana ambisius pemerintah Tiongkok melalui kebijakan *Internet Plus* dan *Made in China 2025* untuk memodernisasi struktur ekonomi Tiongkok dengan mengubahnya menjadi negara dengan manufaktur berteknologi tinggi pada tahun 2020 dan menjadi pusat global inovasi teknologi manufaktur berkekuatan tinggi pada tahun 2050. Langkah tersebut pemerintah Tiongkok ambil salah satunya adalah untuk bebas

⁹² Xinhuanet, "Chinese insurance regulator takes control of Anbang Insurance Group," November 13, 2018 available at http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/23/c_136993912.htm

melalui beberapa regulasi yang tertuang dalam kebijakan tersebut akan berdampak terhadap perusahaan teknologi Amerika Serikat.

Pada undang-undang keamanan nasional Tiongkok yang diberlakukan pada bulan juli 2015 dalam pasal 24 mengatakan “Negara akan memperkuat pembentukan kapasitas untuk inovasi teknologi secara independen, mempercepat pengembangan teknologi maju secara strategis yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, memperkuat kekayaan hak intelektual.” Serta, pasal 59 yang mengatakan bahwa “Negara menetapkan tinjauan keamanan nasional dan mekanisme sistem keamanan serta manajemen pengawasan untuk melakukan tinjauan keamanan nasional terhadap investasi asing, barang-barang teknologi khusus, informasi melalui internet serta hal-hal lainnya yang akan berdampak pada keamanan nasional Tiongkok.”⁹⁵

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh AmCham pada 7 november 2015 pasca di berlakukannya undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang baru tidak akan bisa berpengaruh banyak terhadap peningkatan keamanan nasional Tiongkok, melainkan hanya akan menciptakan hambatan untuk perdagangan saja. Kritikus lain juga berpendapat bahwa ketentuan undang-undang terlalu luas

⁹⁵ Translation from the Council on Foreign Relations, *National Security Law of the People's Republic of China*, November, 12 2018, tersedia dalam <http://www.cfr.org/homeland-security/national-security-law-peoples-republic-china/p36775>.

mengenai tingkat kerjasama di bidang teknologi internet yang juga akan menyebabkan masalah baru terhadap pembatasan internet.⁹⁶

Seperti yang tampak bahwa cita-cita Tiongkok untuk menghentikan segala ketergantungan terhadap inovasi teknologi non domestik membuat banyak perusahaan teknologi Amerika Serikat terpaksa gulung tikar, sebut saja *Google*, *Google* terpaksa meninggalkan Tiongkok karena beberapa media sosial termasuk *Google* telah pemerintah Tiongkok larang penggunaanya di Tiongkok melalui serangkain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok seperti *The Great Fire Wall*. *United State Trade Repsentative* memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa:

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Tiongkok menekankan peran negara dalam ekonomi. Menjadi negara yang memimpin dalam bidang pembangunan ekonomi, pemerintah Tiongkok mulai mengejar kebijakan yang berfokus pada industri maju yang lebih luas. Kebijakan ini juga dirancang membatasi akses pasar untuk barang-barang impor, produsen asing dan pemasok jasa luar negeri. Kebijakan ini dipenuhi dengan regulasi yang hanya menguntungkan industri Tiongkok terutama didominasi oleh perusahaan milik negara (BUMN). Peran negara Tiongkok yang begitu signifikan dan mendominasi dalam ekonomi di perkuat oleh pemerintah Tiongkok dengan tindakan-tindakan

⁹⁶ Lawfare, *Understanding China's Cybersecurity Law*, November 12 2018, tersedia dalam <https://www.lawfareblog.com/understanding-chinas-cybersecurity-law>

yang mengakibatkan adanya ketengangan Tiongkok dengan negara mitra dagangnya termasuk Amerika Serikat.⁹⁷

Pasca terpilihnya presiden Donald Trump mengatikan kepemimpinan sebelumnya yakni Barack Obama, presiden Trump membentuk tim investigasi yang di beri nama tim “301”, tim ini dibentuk dari *United State Trade Representative* (USTR). Banyak ketegangan yang kemudian muncul dalam hubungan perdagangan antara Ammerika Seriat dengan Tiongkok yang dapat dilacak melalui kebijakan dan praktik intervensionis pemerintah Tiongkok yang dilakukan oleh tim investasi yang di bentuk oleh presiden Trump. Laporan yang dikeluarkan baru-baru ini di keluarkan mengidentifikasi beberapa bidang yang menjadi prioritas Amerika Serikat terhadap permasalahan dengan Tiongkok dan dibawa dalam penyelesaian sengketa WTO meliputi:

1. Hak kekayaan intelektual dan pertukaran akses pasar, pembajakan perangkat lunak, pembajakan online serta barang tiruan atau barang palsu
2. Kebijakan Industri terutama di bidang manufaktur (*Internet Plus* dan *Made in China 2025*), inisiatif untuk menghentikan ketergantungan terhadap inovasi teknologi non-domestik,

⁹⁷ US Trade Representative, *2013 USTR Report to Congress on China's WTO Compliance*, December 2013, hal 02

pesyaratan transfer teknologi untuk pertukaran akses pasar, pembatasan ekspor pada bahan mentah, pelakuan diskriminatif pemerintah pada kebijakan teknologi dan pembatasan investasi.

3. Pembatasan pada layanan non domestik seperti film di bioskop, layanan audio visual, asuransi, perbankan, aktivitas uklan di internet, dan layanan hukum.
4. Transparansi yang tidak memadai termasuk dalam hal publikasi secara hukum.
5. Membatasi aspek kerangka hukum, terutama dalam hal lisensi administrative dan kebijakan persaingan yang diterapkan oleh Tiongkok.⁹⁸

Adanya kebijakan terkait pengembangan teknologi dan industri manufaktur melalui kebijakan *Internet Plus* dan *Made in China 2025* telah menjadi bagian khusus dari prioritas Amerika Serikat untuk membawa permasalahan tersebut ke tingkat WTO, dimana Tiongkok telah melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan barat melali serangkaian kebijakan insutri manufaktur dan teknologi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan non domestik.

⁹⁸ USTR, *2016 Report to Congress on China's WTO Compliance*, November 2018, available at <https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf>.

1. Kebijakan Tarif Impor Amerika Serikat ke Tiongkok di bawah Administrasi Presiden Donald Trump

Di bawah kepemimpinan presiden baru Amerika Serikat yang terpilih yakni Donald Trump ia telah mengambil sejumlah langkah terkait dengan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pada pertemuan resmi pertaa yang di selenggarakan pasca ia terpilih menjadi kepala negara Amerika Serikat yang baru pada April 2017, presiden Trump dan presiden Xi Jinping mengumumkan pembentukan “Rencana 100 hari terkait perdagangan” serta menyelenggarakan forum tingkat tinggi yang disebut sebagai “Dialog Komprehensif AS-Tiongkok”.⁹⁹

Setelah pertemuan digelar antar dua negara yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, menteri luar negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson menyatakan bahwa “Presiden Trump telah mencatat sejumlah tantangan yang disebabkan karena intervensi Tiongkok melalui sejumlah kebijakan yang telah di terapkan di Tiongkok. kekhawatiran serius dirasakan untuk pengaruh dari beberapa kebijakan industri manufaktur Tiongkok, teknologi, pertanian dan *Cyber* Tiongkok pada Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat akan mengambil langkah yang tepat akan permasalahan ini” Dibawah ini

⁹⁹ Home Treasury of United State. Diakses pada 13 November 2018, tersedia dalam <https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-04/2018-04-13-Spring-2018-FX-Report-FINAL.pdf>

akan disajikan kotak laporan administrasi presiden Trump terkait sejumlah kebijakan ekonomi Tiongkok khususnya bidang industri manufaktur yang menjadi perhatian Amerika Serikat:¹⁰⁰

Tabel 4.1

Laporan Strategi Keamanan Nasional AS Tahun 2017 Mengennai Kebijakan Inovasi Industri Ekonomi Tiongkok

**Laporan Strategi Keamanan Nasional Presiden Trump Tahun 2017
Mengennai Kebijakan Inovasi Industri Ekonomi Tiongkok**

Laporan ini akan menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Tiongkok yang menjadi perhatian Amerika Serikat. Berikut ini adalah beberapa kutipannya:

- Hari ini, Amerika Serikat harus bersaing untuk sebuah hubungan kerjasama yang positif di seluruh dunia. Tiongkok dan Rusia menargetkan investasi mereka di negara berkembang untuk memperluas pengaruh mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif melawan Amerika Serikat.
- Meskipun Amerika Serikat telah mempertahankan hubungan kerjasama dagang dengan Tiongkok, Tiongkok terus mengeluarkan kebijakan untuk membujuk negara-negara lain untuk mengidahkan rezim politiknya dengan agenda keamanan.
- Tiongkok mendapatkan pijakan yang strategis di Eropa dengan memperluas praktik dagang yang tidak adil di bidang investasi dan infrastruktur.
- Tiongkok dan Rusia menantang kekuatan Amerika Serikat dan berusaha mengikis keamanan serta kemakmuran Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengemabngkan perdagangan

¹⁰⁰ Ibid.,

yang tidak adil agar memperluas pengaruh mereka di dunia internasional.

- Setiap tahun pesaing seperti Tiongkok mencuri kekayaan intelektual Amerika Serikat senilai ratusan dolar untuk memasuki inovasi pasar industri.

Sumber: Home Treasury of United State, 2018

Pada tanggal 14 Agustus 2017, Presiden Trump mengeluarkan memorandum yang mengarahkan USTR untuk menentukan apakah harus melucurkan investigasi 301 atas perlindungan hak kekayaan intelektual Amerika Serikat di Tiongkok dan atas kebijakan Tiongkok untuk transfer teknologi sebagai akses pertukaran pasar di Tiongkok sebagai arah menentukan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi Amerika Serikat.¹⁰¹ Pada 18 Agustus 2017, USTR mengumumkan telah melucurkan kasus yang telah mengalami penyelidikan “301” terhadap Tiongkok.

Terkait investigasi 301 dijelaskan oleh pihak gedung putih telah mengidentifikasi empat kebijakan terkait hak kekayaan intelektual yang dinyatakan sebagai berikut: 1) Tiongkok telah menggunakan persyaratan dalam usaha patungan, pembatasan investasi asing; 2) Tinjauan administratif untuk proses perizinan yang diskriminatif untuk mentransfer teknologi dari perusahaan Amerika Serikat ke Tiongkok; 3)

¹⁰¹ For additional information, see CRS In Focus IF10708, *Enforcing U.S. Trade Laws: Section 301 and China*, by Wayne M. Morrison.

Mengarahkan serta memfasilitasi investasi dan akuisisi yang menghasilkan transfer teknologi berskala besar; 4) Melakukan kejahatan dalam dunia maya ke jaringan computer Amerika Serikat untuk mendapatkan akses informasi bisnis yang berharga milik AS. USTR telah merilis kebijakan Tiongkok yang berdampak negative terhadap pemangku kepentingan Amerika Serikat, yang menyebabkan kerugian hampir \$50 miliar per-tahun.¹⁰²

Berdasarkan hasil dari investigasi bagian 301 maka diusulkan tindakan yang akan di lakukan untuk Tiongkok yang meliputi: 1) Menerapkan 25% tariff impor pada barang tertentu dari Tiongkok (yang jumlahnya setara dengan kerugian yang di peroleh Amerika Serikat); 2) Membawa kasus ini kedalam penyelesaian sengketa di WTO terhadap perizinan teknologi yang diskriminatif yang dilakukan Tiongkok dan; 3) Mengusulkan pembatasan investasi Tiongkok untuk memperoleh teknologi Amerika Serikat.¹⁰³

Pada 8 Maret 2018, USTR mengeluarkan tariff 25% yakni senilai \$50 miliar untuk produk Tiongkok. USTR menyatakan bahwa tariff yang diusulkan akan ditargetkan pada produk Tiongkok yang menjadi prioritas Tiongkok dalam sektor kebijakan industri teknologi

¹⁰² USTR, *Press Release*, March 22, 2018, available at <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2018/march/president-trump-announces-strong>.

¹⁰³ *Ibid.*,

tinggi Tiongkok seperti “*Internet Plus* dan *Made in China 2015*”. Sektor yang di targetkan Amerika Serikat kepada Tiongkok meliputi, besi dan baja, teknologi kedirgantaraan, informasi dan komunikasi, robotika dan juga mesin.¹⁰⁴ Dijatuhkannya tariff impor kepada Tiongkok oleh presiden Trump setelah dilakukan penyelidikan oleh tim 301 dari USTR adalah sebagai hukuman untuk Tiongkok atas adanya serangkaian praktik dagang yang tidak adil. *Congress H.R 3039* telah memberikan wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan hukuman tertentu kepada aktor-aktor negara atas tindakan yang tidak menguntungkan Amerika Serikat.

Pada tanggal 8 Maret 2018, Trump mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan tarif impor tambahan pada baja (sebesar 25%) dan aluminium (10%). Tiongkok menjadi target utama, hal tersebut dikarenakan Tiongkok merupakan negara yang mencakup setengah dari produksi baja dan aluminium global. Dari segi kuantitas impor, Tiongkok adalah 10 besar pemasok baja terbesar dan 4 besar untuk aluminium.

¹⁰⁴ Wayne M. Morrison. *China-US Trade Issue (2018)*. Congressional Research Service. Tersedia dalam www.crs.gov diakses pada 12 November 2018

2. Dampak Ekonomi atas Penjatuhan Tarif Impor Amerika Serikat Terhadap Tiongkok

Adanya perselisihan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dapat secara signifikan berpengaruh terhadap hubungan komersial antara kedua negara, dan juga secara global. Selain menjatuhkan tarif balasan untuk Amerika Serikat, Tiongkok juga dapat melakukan hal yang disebutkan di bawah ini:

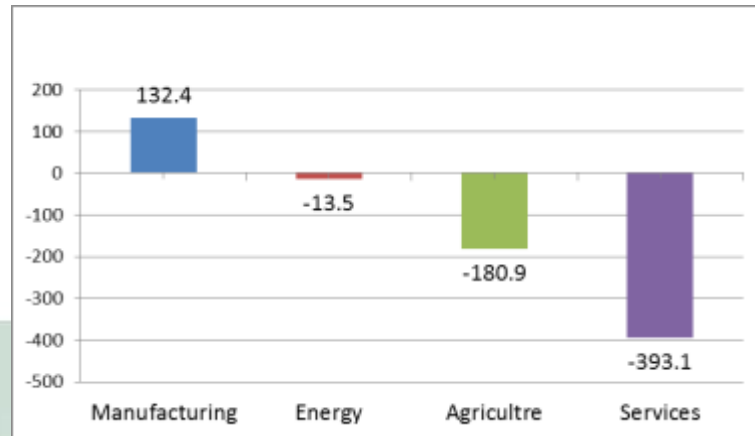
- a) Mendorong warga negaranya untuk memboikot layanan serta produk Amerika Serikat;
- b) Memberlakukan pembatasan dan peraturan baru pada aktifitas perusahaan komersial Amerika Serikat di Tiongkok (seperti membatasi FDI Amerika Serikat di Tiongkok);
- c) Selektif dalam meningkatkan penegakan hukum dan peraturannya terhadap Amerika Serikat (misalnya, meningkatkan inspeksi kesehatan dan keselamatan komoditas impor Amerika Serikat atau menunda izin bea dan cukai);
- d) Mengurangi kepemilikan surat berharga Amerika Serikat dan;
- e) Mendesak perusahaan Tiongkok untuk mencari pemasok barang dagang non-AS.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid.,

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencoba mengukur dampak terhadap ekonomi AS atas tariff impor yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk Tiongkok. Laporan yang memperkirakan akan dampak pasca penjatuhan tariff impor Amerika Serikat ke Tiongkok yakni dari *Trade Partnership Worldwide for the Consumer Technology Association and National Retail Federation* laporan tersebut memperkirakan ekonomi Amerika Serikan akan terekena dampak sebagai berikut:

- a) PDB Amerika Serikat jatuh sebesar 0.26% atau \$49,2 miliar;
- b) Tiongkok akan membalas dengan kebijakan yang serupa pada Amerika Serikat;
- c) Pendapatan properti dibidang pertanian bisa turun 15,01%;
- d) Hilangya banyak lapangan pekerjaan bagi pekerja Amerika Serikat;
- e) Ekspor dan impor Amerika Serikat bisa turun \$ 105,5 miliar dan \$ 341,2 miliar.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Trade Partnership Worldwide, LLC, *Tariffs on Imports from China: The Estimated Impacts on the U.S. Economy*, April 30, 2018, available at <http://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2018/04/China-301-Tariffs-FINAL.pdf>.



Sumber: Trade Partnership Worldwide, 2018

Grafik 4.4:
Perkiraan Pengaruh pada Sektor
Ketenagakerjaan Baik AS Maupun Tiongkok Apabila
Menjatuhkan Tarif Sebesar 25%

C. TIONGKOK MENJATUHKAN KEBIJAKAN BALASAN SERUPA “TARIF IMPOR” TERHADAP AMERIKA SERIKAT DI TAHUN 2018

Pada tanggal 1 April 2018, Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok telah menaikkan bea (sebesar 15% hingga 25%) pada 128 tarif impor dari Amerika Serikat. Produk-produk yang dikenakan tarif oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat meliputi, daging babi, buah-buahan seperti anggur serta kacang-kacangan, yang nilainya setara dengan \$3 miliar pada tahun 2017.¹⁰⁷ Hal tersebut dilakukan oleh

¹⁰⁷ Wayne M. Morrison. *China-US Trade Issue (2018)*. Congressional Research Service. Tersedia dalam www.crs.gov diakses pada 12 November 2018

pemerintah Tiongkok atas dasar tindakan penjatuhan tarif impor Amerika Serikat kepada Tiongkok pada bulan maret. Dibawah ini merupakan tariff pembalasan yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat.

Tabel 4.2:
Tarif Pembalasan Tiongkok Terhadap Amerika Serikat untuk
Baja dan Alumunium

| HTS Commodity | HTS Description | 2017 Imports from U.S. (\$ millions) | Tariff increase |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| 02064900 | Edible Offal Of Swine, Frozen (Excl. Livers) | 874 | 25% |
| 76020000 | Waste And Scrap, Aluminum | 832 | 25% |
| 08025100 | Fresh Or Dried Pistachios, In Shell | 175 | 15% |
| 08092900 | Fresh Cherries (Excl. Sour Cherries) | 170 | 15% |
| 02032900 | Other Frozen Swine Meat | 168 | 25% |
| 02032200 | Hams, Shoulders And Cuts Thereof, Of Swine, Bone In, Frozen | 118 | 25% |
| 08051000 | Oranges, Fresh Or Dried | 87 | 15% |
| 73045910 | Tubes, Pipes And Hollow Profiles | 76 | 25% |
| 22042100 | Other Wine & Grape Must With Fermentation Produced By Alcohol, Containers≤2L | 76 | 15% |
| 08021200 | Almonds, Fresh Or Dried ,Shelled Or Peeled | 68 | 15% |
| Total Top 10 | | 2,644 | |

Source: Chinese Ministry of Commerce and Global Trade Atlas. □

Setelah dijatuhkannya tariff balasan oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat, tidak bisa dipungkiri akan berdampak ke beberapa sektor. Kenaikan ekonomi Tiongkok memiliki efek positif dan negatif terhadap Amerika Serikat. Di satu sisi, reformasi ekonomi

dan perdagangan yang dilakukan Tiongkok telah menjadikan pasar Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan bagi para eksportir Amerika Serikat maupun barang-barang murah bagi konsumen Amerika Serikat. Di sisi lain, Tiongkok belum sepenuhnya beralih ke ekonomi pasar bebas. Pemerintah Tiongkok terus melakukan intervensi di banyak bagian ekonomi yang sering mendistorsi pasar secara global dan domestik. Banyak analisis berpendapat bahwa Tiongkok telah menjadi faktor terbesar dalam kelebihan kapasitas global di sejumlah industri termasuk baja dan aluminium.

Tiongkok telah mengindikasikan sejumlah tujuan dan rencana meningkatkan inovasi dan daya saing untuk sejumlah industri. Namun, sejumlah inisiatif yang terdapat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam rencana lima tahun ke 13 tersebut tampaknya hanya melindungi perusahaan domestik dan mengabaikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan non-domestik pula yang bertujuan untuk menghentikan ketergantungan Tiongkok terhadap inovasi teknologi asing, seperti inisiatif *Internet Plus* dan *Made in China 2025*.¹⁰⁸

Setelah dipaparkan beberapa data diatas maka terlihat bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok

¹⁰⁸ Wayne M. Morrison. *China-US Trade Issue (2018)*. Congressional Research Service. Tersedia dalam www.crs.gov diakses pada 12 November 2018

pasca diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* yakni hubungan kedua negara mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016 pasca pertemuan antara presiden Obama dan presiden Xi Jinping hubungan keduanya membaik yang diikuti dengan pertumbuhan FDI di kedua negara. Kemudian pasca terpilihnya presiden Trump untuk memimpin Amerika Serikat, hubungan kedua negara kembali mengalami ketengangan pasca presiden Trump membentuk tim investigasi 301 dari USTR untuk menyelidiki persaingan pasar yang tidak adil oleh Tiongkok melalui serangkaian kebijakan ekonomi.

Kemudian setelah menghasilkan temuan Trump menjatuhkan tariff impor kepada Tiongkok untuk produk besi dan baja serta produk-produk lain yang menjadi prioritas dalam kebijakan *Internet Plus* dan *Made in China 2025*. Setelah dijatuhkannya tariff impor oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok, Tiongkok pun membalas dengan kebijakan yang serupa terhadap beberapa barang-barang impor Amerika Serikat. Sehingga hal tersebut menjadikan munculnya istilah yang baru-baru ini *booming* yakni *Trade War Between US and China* atau Perang Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

D. PENGHENTIAN SEMENTARA KEBIJAKAN TARIF IMPOR ATAU PERANG DAGANG ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Pada tanggal 01 Desember 2018 presiden Trump dan Presiden Xi Jinping melakukan pertemuan di sela pertemuan KTT G20 yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina. Di sela pertemuan tersebut kedua pemimpin ekonomi raksasa dunia tersebut sepakat untuk menghentikan perang dagang selama 90 hari hingga ditemukannya solusi atas ketegangan yang terjadi atas diimplementasikannya beberapa kebijakan Tiongkok terkait inovasi industri ekonomi. Penghentian sementara perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini artinya bahwa Presiden Trump sementara akan menghentikan tariff sebanyak US\$200 miliar atas barang-barang impor dari Tiongkok. Presiden Trump juga menyepakati untuk tidak menaikkan tariff impor sebesar 25% atas barang-barang dari Tiongkok. Kesepakatan penghentian sementara tariff impor akan diberlakukan per 01 Januari 2019.¹⁰⁹

Berikut ini adalah empat kesepakatan yang telah disetujui dalam pertemuan singkat antar presiden Trump dan presiden Xi Jinping.¹¹⁰

¹⁰⁹ Suci Sekarwati. *Cina dan Amerika Serikat Sepakat Hentikan Perang Dagang* (02 Desember 2018). Diakses pada 10 Desember 2018, tersedia dalam <https://dunia.tempo.co>

¹¹⁰ Maria Rita Hasugian. *4 Kesepakatan Dari Penghentian Sementara Perang Dagang AS-Cina* (03 Desember 2018). Diakses pada 10 Desember 2018, tersedia dalam <https://dunia.tempo.co>

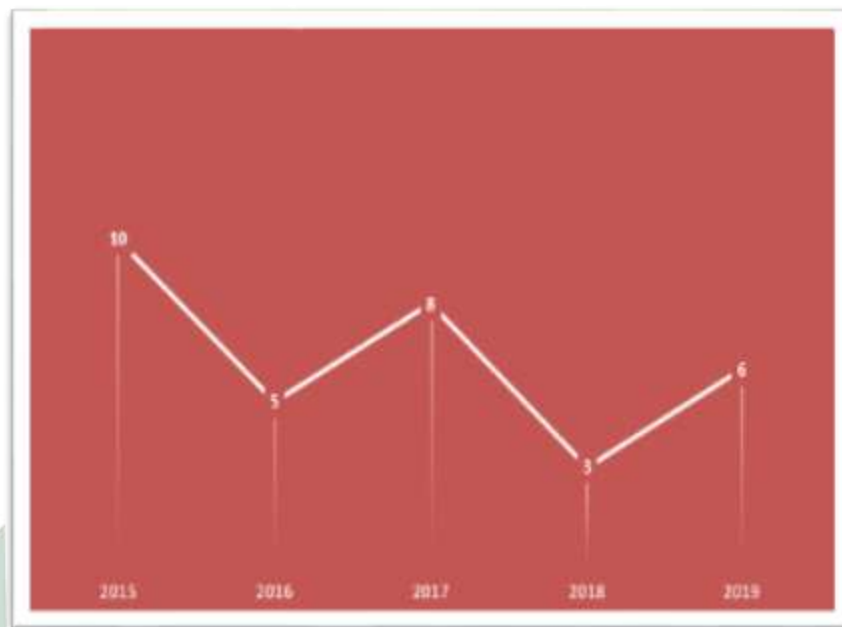
- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak menaikkan tariff per 01 Januari 2019. Hal tersebut membuat Amerika Serikat akan meninggalkan tariff impor sebesar US\$ 200 miliar atas barang-barang impor dari Tiongkok.
- 2) Sepakat untuk tidak menaikkan tariff impor atas barang-barang impor dari Tiongkok sebesar 25%.
- 3) Tiongkok sepakat untuk banyak membeli barang-barang dari Amerika Serikat khususnya dalam bidang pertanian, energi, industri dan prosuk-prosuk yang lainnya.
- 4) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan perundingan terkait perubahan struktur demi menyelesaikan sengketa terkait transfer teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau *property rights* serta hambatan non-tarif, mencegah kejahatan dalam dua *cyber*, serta jasa dan juga pertanian.

Artinya, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok telah sepakat untuk menghentikan sementara perang dagang atau kebijakan tariff impor selama 90 hari per 1 januari 2019, hingga adanya diperolehnya kesepakatan yang akan dilanjutkan pada peremuan antar kedua negara tersebut.

Pengaruh implementasi kebijakan *Internet Plus* Tiongkok terhadap hubungan kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok akan peneliti ringkas melalui bagan pada halaman berikutnya:

Bagan 4.7:**Pengaruh Implementasi Kebijakan *Internet Plus* Terhadap****Kerjasama Dagang AS-Tiongkok**

Sementara itu, fluktuasi hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah diimplementasikannya kebijakan *Internet Plus* akan peneliti sajikan dalam grafik di bawah ini:



Grafik 4.5:
Fluktuasi Hubungan Dagang antara AS-Tiongkok setelah
Implementasi Kebijakan *Internet Plus* (2015-2019)

Sumber: Diolah sendiri oleh peneliti

Grafik yang telah peneliti sajikan di atas merupakan gambaran fluktuasi hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah diimplementasikannya kebijakan *internet plus*. Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab III bahwa tahun 2015 kebelakang hubungan kerjasama perdagangan yang terjalin antara Amerika Serikat bisa disebut baik, dimana kedua negara aktif mengirimkan delegasi untuk menghadiri kegiatan terkait kerjasama antar kedua negara. Arus FDI juga dapat dikatakan stabil bahkan meningkat seperti yang disajikan dalam grafik 3.2.

Pertengahan tahun 2015 pemerintah meluncurkan rencana aksi 5 tahun ke 13 yakni *Internet Plus* yang membawa banyak pro dan kontra bagi negara mitra dagang Tiongkok yang merasa banyak dirugikan karena diimplementasikannya beberapa kebijakan industri manufaktur. Hal tersebut membuat presiden Obama menginisiasi pertemuan dengan presiden Xi Jinping pada akhir tahun 2016. Hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara khususnya Tiongkok telah sepakat untuk melakukan perdagangan yang adil. Sehingga investasi asing AS di Tiongkok sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2017.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok kembali memanas pada tahun 2018 pasca Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat menggantikan Obama. Presiden Trump membentuk tim investigasi 301 dari USTR, yang berfokus untuk menyelidiki praktik dagang tidak adil yang dilakukan oleh Tiongkok melalui serangkaian kebijakan termasuk *Internet Plus*. penyelidikan tersebut menghasilkan temuan bahwa Tiongkok telah mencuri hak kekayaan intelektual milik Amerika Serikat. Sehingga pada bulan Maret presiden menjatuhkan tarif impor kepada Tiongkok sebesar 25% untuk aluminium dan baja. Dijatuhkannya tarif impor mengindikasikan bahwa hubungan kedua negara ini tengah mengalami ketegangan.

Penjatuhan tarif Amerika Serikat kepada Tiongkok membuat hubungan kerjasama kedua negara memanas. Presiden Xi Jinping pada

April 2018 mengeluarkan kebijakan balasan atas tariff impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Tiongkok juga membalas dengan kebijakan yang serupa terhadap kedelai, anggur, daging babi dan beberapa barang lainnya dari Amerika Serikat.

Namun di akhir tahun 2018 hubungan dagang kedua negara sedikit menemukan titik terang untuk kembali baik. Hal tersebut di buktikan dengan pertemuan antar kedua kepala negara yakni Trump dan Xi Jinping di sela acara KTT G-20. Kedua negara sepakat untuk menghentikan tarif impor satu sama lain selama 90 hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai ditemukannya solusi atas kebijakan industri Tiongkok yang dirasa sangat merugikan negara mitra dagang Tiongkok.

Paparan diatas dirasa tepat untuk membuktikan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah implementasi kebijakan *Internet Plus* mengalami kondisi yang fluktuatif, seperti yang telah disebutkan peneliti pada argumentasi utama di bab I.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab II, III dan IV dapat disimpulkan bahwa terdapat empat pengaruh yang ditimbulkan atas adanya implementasi kebijakan *internet plus* Tiongkok terhadap hubungan kerjasama dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Pertama, terjadinya pertemuan antara presiden Barack Obama dan Presiden Xi Jinping pada tahun 2016 membahas beberapa ketimpangan yang ada dalam inisiatif kebijakan *Internet Plus*. pertemuan ini terjadi atas dasar tekanan yang terus meningkat pada perusahaan asing untuk berbagi teknologi sebagai pertukaran akses pasar di Tiongkok yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan asing mengalami kerugian karena beberapa kebijakan industri ekonomi yang berfokus pada inovasi manufaktur modern yang dikeluarkan oleh Tiongkok.

Kedua, dijatuhkannya kebijakan "Tarif Impor" oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok pada tahun 2018. Kebijakan tariff impor dijatuhkan kepada Tiongkok setelah Trump membentuk tim investigasi 301 dan menghasilkan beberapa temuan. Presiden Trump telah mencatat sejumlah tantangan yang disebabkan karena intervensi Tiongkok melalui sejumlah

kebijakan yang telah di terapkan di Tiongkok. sehingga pada bulan Maret presiden Trump menjatuhkan tariff sebanyak 25% terhadap barang impor Tiongkok termasuk baja dan alluminium.

Ketiga, Tiongkok menjatuhkan kebijakan balasan yang serupa yakni “Tarif Impor” untuk produk Amerika Serikat yang berupa buah-buahan seperti anggur, kacang-kacangan seperti kedelai, daging bagi dll. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Tiongkok sebagai kebijakan pembalasan untuk Amerika Serikat yang mengeluarkan kebijakan 25% tariff impor untuk Tiongkok.

Keempat, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat sepakat untuk menghentikan sementara perang dagang selama 90 hari hingga ditemukannya solusi atas ketegangan yang terjadi atas diimplementasikannya beberapa kebijakan Tiongkok terkait inovasi industri ekonomi. Penghentian tariff ini akan dilakukan selama 90 hari terhitung mulai 01 januari 2019.

Setelah memaparkan beberapa data temuan terlihat adanya hubungan kerjasama yang fluktuatif atau naik turun antara AS-Tiongkok pasca diimplementasikannya beberapa kebijakan terkait inovasi industri ekoomi oleh Tiongkok.

B. SARAN

Peneliti secara sadar sangat menyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil

dari apa yang telah diteliti. Peneliti menyarankan apabila dilakukan penelitian lanjutan sebaiknya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak, penelitian sebaiknya melengkapinya dengan metode wawancara, menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dan lokasi pekerjaan yang lebih luas sehingga data yang didapat pun dapat lebih bervariasi.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih baik dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pengaruh kebijakan *Internet Plus* terhadap hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok melalui pembaharuan studi kasus yang terjadi antar kedua negara di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

(Buku)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin, Depok, Al Huda, 2015.

Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press, 2004.

Iskandar Putong. *Economics* Pengantar Mikro dan Makro .2013. Mitra Wacana Media.

Krasner. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton: Princeton University Press, 1999.

Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Research Report on China-US Economic and Trade Relations. Mei 2017. Hal 6-8

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2011.

Porter, Michael, "*The Competitive Advantage of Nations with a New Introduction*", New York: The Free Press, 1990.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. Memahami penelitian kualitatif. Bandung. ALFABETA, 2010.

Woetzel Jonathan dan Seong Jeongmin, eds., *China's Digital Economy A Leading Global Force* (United State: McKinsey Global Institute). Diakses pada 13 Desember 2017, <http://DigitalEconomyReportMcKesney.pdf>. 2017

Yanuar, Ikbar. Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung. PT Refika Aditama, 2014.

(Jurnal)

American Chamber of Commerce in the People's Republic of China, "2016 China Business Climate Survey Report," 2016. Hal 06

- Betty Xu. Internet Plus Strategy of China. 2015. Laporan SESEC III. SC Steering Committees ETSI Stakeholders.pdf
- Communication (2017), diakses pada 11 Desember 2017, <http://ijoc.org./index.php/ijoc/article/viewfile/6105/1990.pdf>
- David Dollar, “United States-China Two-Way Direct Investment: Opportunities and Challenges,” *Brookings Institution*, January 2015, 11
- David Schulze, Nadine Godehardt. China 4.0 Partu and Society Debate the Digital Transformation. 2017. German Institutur for international and Security Affairs
- Espinel, Victoria A. The Digital Economy: What is it and How Will it Transform our Lives. 2016. World Economic Forum Research Paper.
- European Union Chamber of Commerce in China. China Manufacturing 2025. 2017. Europeaan Union Report. Diakses pada 09 September 2018. www.europeanchamber.com.cn
- Freedom House, *Freedom on the Net 2015*, diakses pada 12 November 2018, tersedia di https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FOTN_2015Report.pdf.
- G20 Blue Print On Inovative Growth
- Hong Yu, “Pivot to Internet Plus: Molding China’s Digital Economy for Economic Restructuring?,” No. 1486–1506, *International Journal of Communication* (2017), diakses pada 11 Desember 2017, <http://ijoc.org./index.php/ijoc/article/viewfile/6105/1990.pdf>
- Lawfare, *Understanding China's Cybersecurity Law*, November 12 2018, tersedia dalam <https://www.lawfareblog.com/understanding-chinas-cybersecurity-law>
- Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, “Research Report on China-US Economic and Trade Relations, 2017,” Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, <http://www.china-usresearchreport.pdf> (diakses pada 13 Desember 2017)
- Muhammad Yuzrizal. 2014. Dampak Implementasi Kebijakan *The Great Firewall* terhadap aktivitas google inc di Cina. Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*). 2016. Towards A G20 Initiative On Measuring Digital Trade: Mapping Challenges And Framing The Way Forward. Research Paper.pdf
- Scott Kennedy and Christopher K. Johnson, “Perfecting China, Inc.,” *Center for Strategic and International Studies*, May 2016, 27–28.
- Towards A G20 Initiative On Measuring Digital Trade: Mapping Challenges And Framing The Way Forward,” Organisation for Economic Co-operation and Development (*OECD*), diakses pada 23 Desember 2017, <https://www.google.co.id/g20/topics/trade/-and-invesment/towards-a-g20-initiative-on-measuring-digital-trade.pdf>
- Translation from the Council on Foreign Relations, *National Security Law of the People's Republic of China*, November, 12 2018, tersedia dalam <http://www.cfr.org/homeland-security/national-security-law-peoples-republic-china/p36775>.
- Translation from the Council on Foreign Relations, *National Security Law of the People's Republic of China*, November, 12 2018, tersedia dalam <http://www.cfr.org/homeland-security/national-security-law-peoples-republic-china/p36775>.
- U.S. Census Bureau. *Trade in Goods with China*. 86. U.S. Census Bureau. *Trade in Goods with China*
- U.S. Chamber of Commerce. *Made in China 2025: Global Ambitions Built on Local Protections*. 2017. United State Chamber of Commerce, www.uschamber.com
- U.S. Trade Representative, *2016 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*, March 2016, hal 91.
- US-China Business Council, “Translation of Provisions on Network Publication Services Administration.”
- USITC, *China: Intellectual Property Infringement, Indigenous Innovation Policies, and Frameworks for Measuring the Effects on the US Economy* (Investigation No. 332-514, USITC Publication 4199, November 2010, hal 06-07
- White House, *Fact Sheet: President Xi Jinping’s State Visit to the United States*, September 25, 2015.

Zhen Zhao et al., “*Impact of Internet Plus to China Development*,” Journal of International Business School, University of International Business and Economics 7, No. 933-944 (2016), diakses pada 13 desember 2017.
<http://www.scirp.org/journal/me>
<http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.79096.pdf>

(Web Pemerintahan)

Home Treasury of United State. Diakses pada 13 November 2018, tersedia dalam <https://home.treasury.gov/sites/default/files/2018-04/2018-04-13-Spring-2018-FX-Report-FINAL.pdf>

Agus Puji Prasetyono, “Persaingan di Era Globalisasi dan Ekonomi Digital,” Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (2017). Diakses pada 23 Desember 2017: <http://risetdikti.go.id/persaingan-di-era-globalisasi-dan-ekonomi-digital/>.

China International Electronic Centre, “*China FTA Network*”. Diakses pada 07 Agustus 2017. Tersedia dalam <http://fta.mofcom.gov.cn/English/index.html>

China Should Boost Digital Economy: Premier Li,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/premier/content_281475764961276.htm

China’s Digital Economy Second Largest in World,” The State Council The People’s Republic of China. Diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.com/content_281475952910142.html

Chinese officials, meeting with Commission, Beijing, China, June 24, 2016; Deutsche Welle, “China Sees Foreign Direct Investment Slowdown,” June 18, 2016

Digital Economy Growth Requires Global Efforts,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_281475965403618.htm

For additional information, see CRS In Focus IF10708, *Enforcing U.S. Trade Laws: Section 301 and China*, by Wayne M. Morrison.

Gunawan Hendro Cahyo. *Internet of Things* (Sejarah, Teknologi dan Penerapannya. Forum Teknologi Vol. 06 No. 3, diakses pada 24 September 2018. <http://pusdiklatmigas.esdm.go.id>

Nation to Further Boost Digital Economy,” The State Council The People’s Republic of China, diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_281475946708926.htm

Ouyang Shijia, “Nation to Further boost digital economy”, The State Council The People’s Republic of China, November 2017. Diakses pada 13 Desember 2017, http://english.gov.cn/content_28147594670892.htm

The White House, *Fact Sheet: US-China Economic Relations*, diakses pada 13 November 2018, available at <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/04/fact-sheet-us-china-economic-relations>.

The World Fact Book,” Central Intelligence Agency, diakses pada 13 Desember 2017, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2153rank.html>

Trade Partnership Worldwide, LLC, *Tariffs on Imports from China: The Estimated Impacts on the U.S. Economy*, April 30, 2018, available at <http://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2018/04/China-301-Tariffs-FINAL.pdf>.

USTR, *2016 Report to Congress on China’s WTO Compliance*, November 2018, available at <https://ustr.gov/sites/default/files/2016-China-Report-to-Congress.pdf>

USTR, pers realease, 3 April 2018, diakses pada 20 November 2018 tersedia di <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/april/under-section-301-action-ustr>

USTR, *Press Release*, March 22, 2018, available at <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/2018/march/president-trump-announces-strong>

Wayne M. Morrison. China-US Trade Issue. 2018. Congressional Research Service. www.crs.gov

Yongqi Hu. 2017. ‘Made in China 2025’ policy Boosted by Manufacturing Update. China Daily. Tersedia dalam <http://english.gov.cn/policies/>

(Media Cetak Online)

Bintoro Agung, “ZTE Kalang Kabut Hadapi Sanksi Pemerintah Amerika Serikat,” CCN Indonesia, April 24, 2018. Diakses pada 07 Agustus

2018, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20180426174500-185-293877>

Cai Songfeng, Zhang Yaxiong, dkk. The Effect of China-US Trade Agreement (CHUSFTA). State Information Center

China Telecom Americas

China's Digital Economy's Growth Will Soon See It Outpace The Traditional Economy," Forbes (2017), diakses pada 13 Desember 2017, <https://t.co/UffCrX0ML7>

Eka Shantika, "Selain Whatsapp, 8 Aplikasi ini juga di Blokir di Cina," CNN Indonesia, September 26, 2017. Diakses pada 13 Desember 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi.html>

Li Yang. China Internet Plus. 2015. Telegraph United Kingdom. Diakses pada 09 September 2018, <http://telegraph.co.uk/chinawatch>

Maria Rita Hasugian. *4 Kesepakatan Dari Penghentian Sementara Perang Dagang AS-Cina* (03 Desember 2018). Diakses pada 10 Desember 2018, tersedia dalam <https://dunia.tempo.co>

Suci Sekarwati. *Cina dan Amerika Serikat Sepakat Hentikan Perang Dagang* (02 Desember 2018). Diakses pada 10 Desember 2018, tersedia dalam <https://dunia.tempo.co>

The South China Morning Post. *There area 668 million internet users in China*. Diakses pada 09 september 2018. Tersedia dalam <http://www.scmp.com/tech/socialgadgets.html>

Xinhuanet, "Chinese insurance regulator takes control of Anbang Insurance Group," November 13, 2018 available at http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/23/c_136993912.html

(YouTube)

CGTN Africa. 2015. Diakses pada 17 Oktober 2018, <https://youtu.be/Naav0plQhFSw>